



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

- Yth
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  2. Para Direktur Lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 43 /PB/2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
PENYUSUNAN KAJIAN FISKAL REGIONAL**

**A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, dan supervisi, serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai Pengelola Fiskal, maka perlu dilakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kajian Fiskal Regional dimaksud diarahkan pada analisis fiskal dan makroekonomi yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan kebijakan fiskal. Analisis fiskal diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan makroekonomi dalam mendukung pencapaian fungsi APBN terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi seperti menyediakan informasi untuk penyusunan kerangka ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal/ penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai alat analisis dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan makroekonomi yang telah ditetapkan. Informasi yang tertuang dalam Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat, serta investor.

**B. Maksud dan Tujuan**

Memberikan petunjuk penyusunan Kajian Fiskal Regional yang dilakukan oleh Kanwil sebagaimana tersebut di dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional mencakup tentang pembentukan tim penyusun, tahapan penyusunan, sistematika penyusunan, dan penyampaian laporan.

**D. Dasar**

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

*PK*

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### E. Petunjuk Pelaksanaan

##### 1. Pembentukan Tim Penyusun

Dalam rangka penyusunan Kajian Fiskal Regional, setiap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kepala Kanwil) membentuk Tim Penyusun sebagai pelaksana yang bertugas melakukan pengumpulan/inventarisasi, pengolahan, dan analisis data keuangan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Penyusun tersebut dapat beranggotakan pejabat/pegawai Kanwil, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, serta *Regional Economist*;
- b. Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, beban kerja, dan kapasitas pegawai;
- c. Susunan Tim Penyusun dan target *output* ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil dengan merujuk pada ketentuan dalam Surat Edaran ini.

##### 2. Tahapan Penyusunan

###### a. Pembentukan Tim Penyusun

Kepala Kanwil membentuk Tim Penyusun lintas bidang untuk melakukan penyusunan kajian.

###### b. Identifikasi Kebutuhan Data

Tim Penyusun mengidentifikasi kebutuhan data dalam rangka penyusunan kajian.

###### c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data Kajian Fiskal Regional dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tim Penyusun melakukan pengumpulan data sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- 2) data yang terkumpul dituangkan ke dalam tabel data fiskal regional.

###### d. Penyusunan Kajian Fiskal Regional

Tim Penyusun melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional, dengan tahapan antara lain sebagai berikut:

- 1) melengkapi dan menguji validitas pengisian tabel data fiskal regional;
- 2) melakukan eksplorasi dan deskripsi kualitatif terhadap data tabel kuantitatif ke dalam batang tubuh laporan;
- 3) menyusun analisis, interpretasi, pengambilan kesimpulan dan rekomendasi;
- 4) menyusun ringkasan eksekutif;
- 5) mempresentasikan konsep Kajian Fiskal Regional kepada Kepala Kanwil; dan
- 6) melakukan finalisasi Kajian Fiskal Regional.

###### e. Pembahasan Kajian Fiskal Regional

Kepala Kanwil dan Tim Penyusun melakukan pembahasan, diskusi, dan *focus group discussion* dengan pihak-pihak terkait (Forum Komunikasi Pemda-Kementerian/Lembaga (K/L), Bank Indonesia, *Regional Economist*).

PL

- f. Penyampaian Kajian Fiskal Regional  
Kajian Fiskal Regional Kanwil disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
- g. Merilis dan menyelenggarakan seminar Kajian Fiskal Regional  
Kanwil bersama dengan Pemerintah Daerah, Perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik serta instansi setempat yang terkait merilis Kajian Fiskal Regional dan selanjutnya menyelenggarakan seminar.

#### F. Sistematika Penyusunan

1. Kajian Fiskal Regional Triwulanan (Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III) diwujudkan berupa Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan (*quarterly flash report*) yang menggambarkan secara ringkas perkembangan terkini kondisi fiskal regional sampai dengan triwulan tersebut beserta analisisnya. Analisis yang disajikan dalam laporan triwulanan hanya bersifat umum, tidak terlalu mendalam sebagaimana yang disajikan dalam laporan tahunan. Adapun sistematika sebagai berikut:
  - a. Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional  
Bagian ini menyajikan dan mengulas secara ringkas data dan informasi terkini terkait indikator ekonomi regional yang dirilis bulanan/triwulanan/semesteran serta perkembangannya dan analisisnya secara umum antar periode misalnya pertumbuhan produk domestik regional bruto (sisi permintaan dan penawaran) dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III, inflasi bulanan, dan indikator lainnya yang relevan sampai dengan Triwulan I/II/III.
  - b. Perkembangan dan Analisis Pendapatan  
Bagian ini menyajikan dan mengulas secara ringkas data dan informasi terkini terkait perkembangan realisasi kinerja pendapatan baik dari APBN maupun APBD dan analisisnya secara umum sampai dengan Triwulan I/II/III. Realisasi pendapatan dirinci berdasarkan jenis pendapatan per kabupaten/kota.
  - c. Perkembangan dan Analisis Belanja  
Bagian ini menyajikan dan mengulas secara ringkas data dan informasi terkini terkait perkembangan realisasi kinerja belanja baik dari APBN maupun APBD dan analisisnya secara umum sampai dengan Triwulan I/II/III. Realisasi belanja pusat (APBN) dapat di-breakdown sampai dengan jenis belanja, K/L, lokasi (kabupaten/kota), maupun jenis kewenangan (KP/KD/DK/TP/UB). Realisasi belanja daerah (APBD) dapat di-breakdown sampai dengan jenis belanja, fungsi, dan urusan per masing-masing kabupaten/kota/provinsi.
  - d. Perkembangan dan Analisis Pembiayaan  
Bagian ini mengulas perkembangan pembiayaan melalui penerusan pinjaman maupun kredit program (apabila ada), serta pembiayaan dalam APBD (apabila ada penerbitan obligasi daerah) dan analisisnya secara umum.
  - e. Perkembangan dan Analisis BLU dan BLUD  
Bagian ini mengulas perkembangan terkait pengelolaan keuangan BLU dan BLUD setempat, termasuk didalamnya realisasi pendapatan dan belanja BLU dan analisisnya secara umum;
  - f. Berita Fiskal Terpilih  
Bagian ini mengulas beberapa isu fiskal regional yang menonjol dan layak diekspose selama Triwulan I/II/III.
2. Kajian Fiskal Regional Tahunan (*annual regional fiscal report*) disusun dengan sistematika antara lain:

*pl*

- a. *Executive Summary*
  - b. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metode (data dan alat analisis) yang digunakan, sistematika penulisan, keterbatasan, dan hal lainnya yang dapat digunakan rujukan oleh pembaca laporan untuk memahami konteks laporan ataupun asumsi yang harus digunakan untuk memahami laporan.
  - c. Bab II Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional

Bagian ini mengulas tentang perkembangan indikator ekonomi regional berupa indikator makroekonomi fundamental yang dirilis bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan beserta analisisnya (*in-depth analysis*) baik yang bersifat deskriptif maupun kuantitatif. Dalam analisis indikator pembangunan perlu dihubungkan antara perkembangan indikator ekonomi regional dengan perkembangan pelaksanaan anggaran pusat maupun daerah baik dari sisi alokasi maupun pelaksanaannya. Apabila dimungkinkan, dapat dilakukan analisis *time series* yang mengkaji hubungan kondisi ekonomi dan pelaksanaan anggaran pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
  - d. Bab III Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN di Tingkat Regional

Bagian ini mengulas tentang pagu dan realisasi APBN sampai dengan Semester II termasuk pengelolaan BLU Pusat dan manajemen investasi pusat beserta analisisnya (*in-depth analysis*) baik yang bersifat deskriptif maupun kuantitatif. Analisis terhadap APBN meliputi analisis terhadap Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, dan Transfer Daerah.
  - e. Bab IV Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD

Bagian ini mengulas tentang pagu dan realisasi APBD sampai dengan Semester II beserta analisisnya (*in-depth analysis*) baik yang bersifat deskriptif maupun kuantitatif. Informasi mengenai APBD yang ditampilkan agar diupayakan meliputi konsolidasi APBD dalam suatu Provinsi, serta mencantumkan masing-masing APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang mencakup juga pengelolaan BLU Daerah dan pengelolaan investasi daerah.
  - f. Bab V Keunggulan dan Potensi Ekonomi Regional

Bagian ini mengulas tentang keunggulan daerah atau sektor daerah yang berpotensi menjadi unggulan daerah beserta analisisnya (*in-depth analysis*) terkait peranan pemerintah pusat dan terutama pemerintah daerah dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan sektor unggulan baik dari sisi alokasi anggaran maupun operasionalnya. Pada bagian ini perlu juga diinformasikan contoh berita fiskal regional yang terpilih.
  - g. Bab VI Analisis Tantangan Fiskal Daerah/Regional

Bagian ini mengulas tantangan yang dihadapi dalam fiskal daerah/regional.
  - h. Bab VII Penutup

Menyajikan kesimpulan atas hasil kajian dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang bersifat indikatif kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - i. Daftar Pustaka.
3. Petunjuk dan Contoh Penyajian Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan (*quarterly flash report*) dapat mengacu pada Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
  4. Panduan Analisis dan Penyajian Kajian Fiskal Regional Tahunan (*annual regional fiscal report*) dapat mengacu pada Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

fr

## G. Standar Penulisan

1. Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan (*quarterly flash report*)
  - a. Penulisan Kajian Fiskal Regional menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 10, satu spasi, *justified align*, margin 2 cm (kiri-kanan-atas-bawah) dengan kertas berukuran A4. Sumber data dan informasi harus dicantumkan sesuai kaidah penulisan yang berlaku;
  - b. Petunjuk dan contoh penyajian adalah sebagaimana pada Lampiran I. Contoh tersebut bukan merupakan *template* yang baku, namun dapat dijadikan acuan format. Penyajian data dan informasi agar dilengkapi dengan ilustrasi grafis dan narasi yang informatif dan relevan dengan konteks;
  - c. Jumlah halaman dibatasi paling banyak adalah 10 halaman. Untuk itu diperlukan kemampuan analisis dan kreatifitas yang tinggi dalam menyajikan laporan yang ringkas dan padat serta bernilai tambah.
2. Kajian Fiskal Regional Tahunan (*annual regional fiscal report*)
  - a. Penulisan Kajian Fiskal Regional menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11, satu setengah spasi, *justified align*, margin 3 cm (kiri-kanan-atas-bawah) dengan kertas berukuran A4. Sumber data dan informasi harus dicantumkan sesuai kaidah penulisan yang berlaku.
  - b. Panduan analisis dan penyajian adalah sebagaimana pada Lampiran II. Panduan tersebut dapat dijadikan acuan namun bukan merupakan *template* yang baku dan tidak menutup kemungkinan bagi kanwil untuk dapat menambahkan metode analisis. Penyajian data dan informasi agar dilengkapi dengan ilustrasi grafis dan narasi yang informatif dan relevan dengan konteks.
  - c. Jumlah halaman dibatasi paling banyak adalah 100 halaman (termasuk lampiran dan referensi). Untuk itu diperlukan kemampuan analisis dan kreatifitas yang tinggi dalam menyajikan laporan yang singkat dan padat serta bernilai tambah.

## H. Penyampaian Laporan

Dengan mempertimbangkan ketersediaan informasi publik (indikator ekonomi regional, pagu dan realisasi APBD, dan lain-lain), maka penyampaian laporan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan (*quarterly flash report*) untuk Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juni tahun berjalan.
2. Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan (*quarterly flash report*) untuk Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan September pada tahun berjalan.
3. Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan (*quarterly flash report*) untuk Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Desember pada tahun berjalan.
4. Kajian Fiskal Regional Tahunan (*annual regional fiscal report*) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Maret pada tahun berikutnya.
5. Khusus untuk Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan (*quarterly flash report*) untuk Triwulan II tahun 2014 disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 2014.
6. Apabila tanggal 10 bulan berkenaan jatuh pada hari libur, maka paling lambat jatuh pada hari kerja berikutnya.
7. *Softcopy* dan *hardcopy* agar disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran. *Softcopy* dikirimkan ke alamat email [lo.ditpa@gmail.com](mailto:lo.ditpa@gmail.com); dan



8. Setelah Kajian Fiskal Regional Tahunan (*annual regional fiscal report*) disampaikan, diupayakan agar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat merilis laporan tersebut bersama Pemerintah Daerah, Perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta instansi setempat yang terkait dan menyelenggarakan seminar dengan pihak-pihak tersebut untuk mendiskusikan hasil kajian.

I. Penutup

1. Petunjuk lain terkait yang belum dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini akan disampaikan kemudian dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Kepala Kanwil diminta untuk melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
3. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

DIREKTUR JENDERAL,



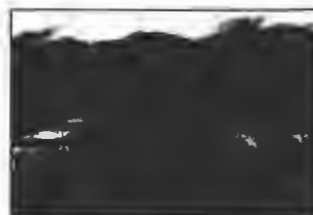
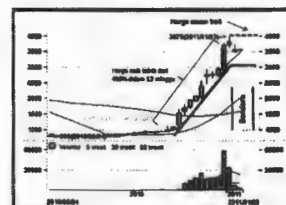
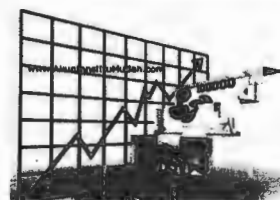
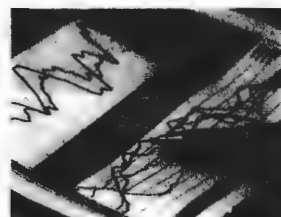
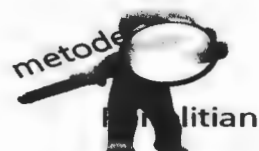
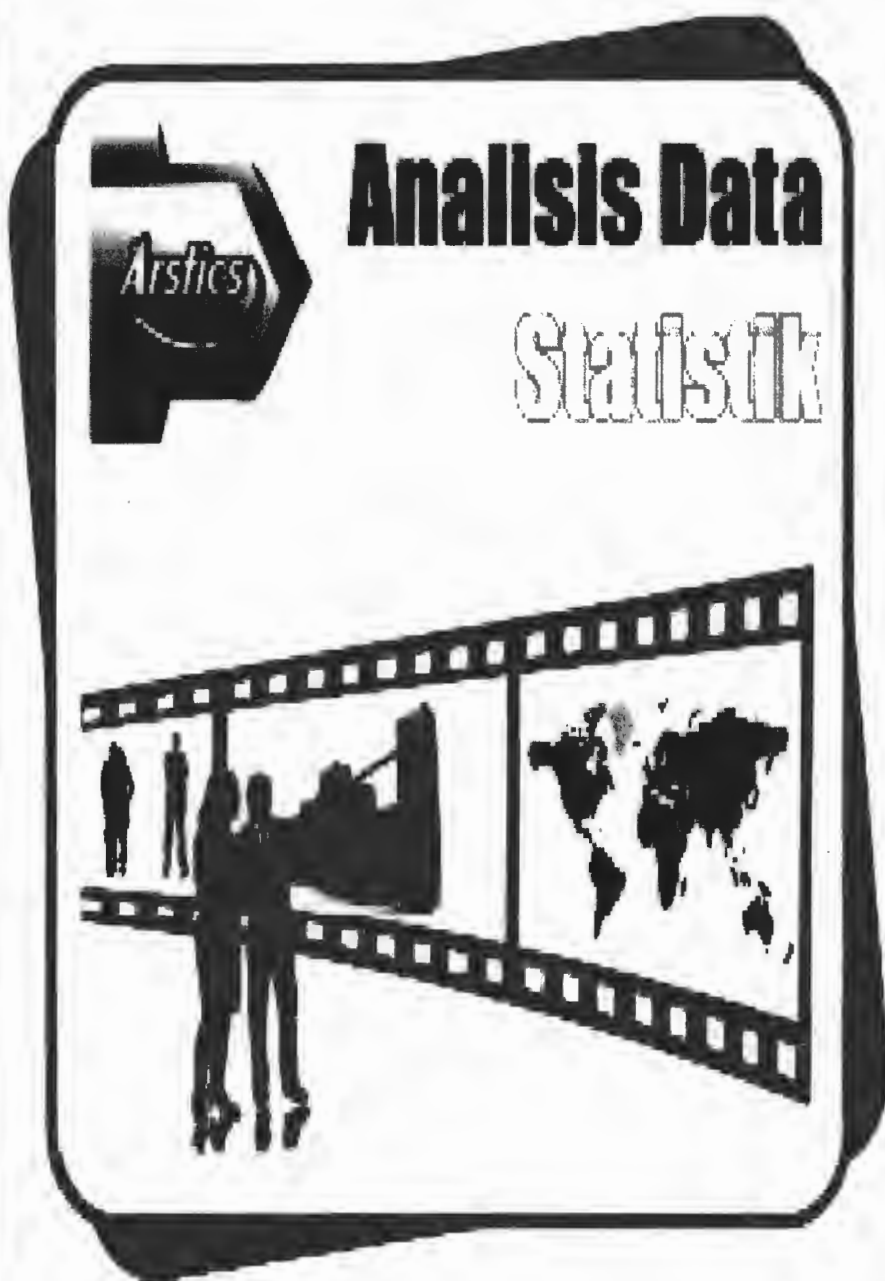
MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP. 6690606 198312 1 001

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR SE- 43 /PB/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYUSUNAN KAJIAN FISKAL REGIONAL



**PETUNJUK DAN CONTOH PENYAJIAN  
TINJAUAN PERKEMBANGAN FISKAL REGIONAL  
TRIWULANAN  
(QUARTERLY FLASH REPORT)**

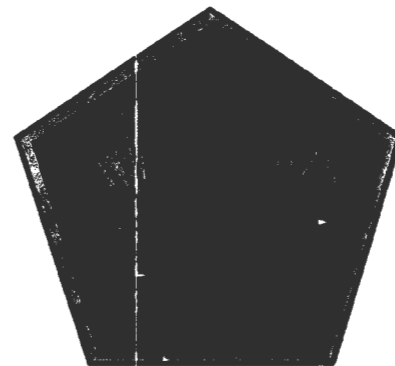


-2014-



- Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan  
(Quarterly Flash Report)  
Provinsi .....
- Triwulan..... Tahun.....

Quote terkait dengan berita fiskal regional terkini yang paling menonjol

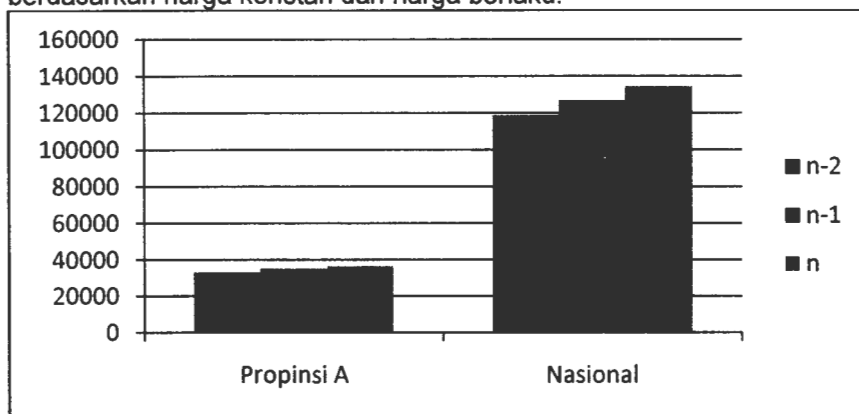


DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN

## A. Perkembangan dan Analisis Indikator Ekonomi Regional

### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD maupun alokasi dana APBN di daerah (DIPA kewenangan kantor pusat K/L, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) merupakan salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping konsumsi dan investasi. Data pertumbuhan ekonomi (PDRB) dapat disajikan dalam bentuk nominal PDRB, laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita. Data yang disajikan meliputi PDRB berdasarkan harga konstan dan harga berlaku.



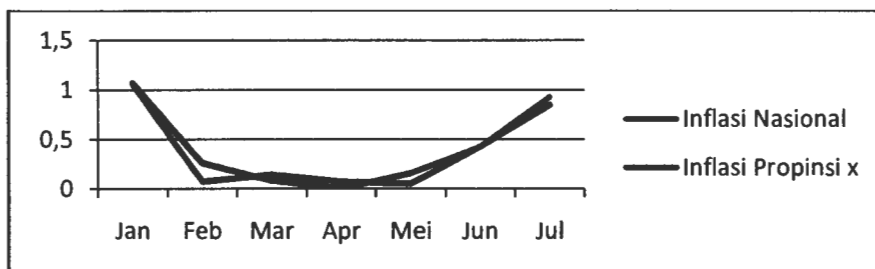
Sumber: BPS, BI

Quote terkait dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

### 2. Inflasi

Inflasi merupakan variabel penting dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah yang tercermin dalam APBD, maupun pengaruhnya terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah. Data inflasi dapat disajikan dalam bentuk grafik atau diagram batang untuk mengilustrasikan :

- Perkembangan inflasi bulanan (mtm) pada suatu provinsi dibandingkan tingkat inflasi secara nasional.
- Perbandingan tingkat inflasi bulanan (mtm) antar kabupaten/kota atau dengan tingkat inflasi provinsi



Sumber: BPS, BI

Quote terkait dengan inflasi

#### Daftar Isi:

- A. Perkembangan Indikator Ekonomi Regional.....
  - 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....
  - 2. Inflasi .....
  - 3. ....
- B. Perkembangan Pendapatan
  - 1. Penerimaan Perpajakan per Kab/Kota .....
  - 2. Penerimaan PNBP per Kab/Kota .....
  - 3. Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan .....
- C. Perkembangan Belanja
  - 1. Belanja Pemerintah Pusat.....
  - 2. Belanja Pemerintah Daerah.....
- D. Berita/Isu Fiskal Regional Terpilih
  - 1. Judul.....
  - 2. Judul.....

#### Tim Penyusun:

Penanggung jawab  
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.....  
Dr.....

Ketua Tim  
Kepala Bidang ..... Kanwil Ditjen  
Perbendaharaan Propinsi .....  
....., M.Sc.

Editor  
....., M. Ak.

#### Desain Grafis

.....

#### Anggota

.....

.....

.....

Nama Kanwil

Alamat

Telepon

Fax

Email

Website

pl

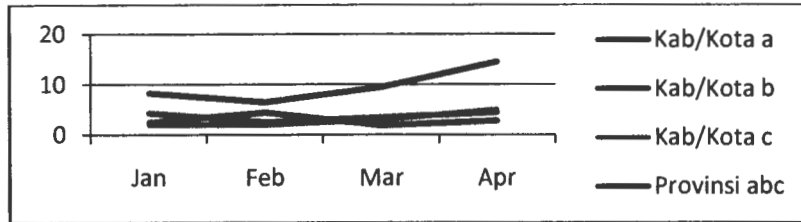
## B. Perkembangan dan Analisis Pendapatan

### 1. Penerimaan Perpajakan per Kab/Kota

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Tujuan menyajikan data penerimaan perpajakan adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak yang dihasilkan dalam suatu kab/kota terhadap penerimaan perpajakan daerah/provinsi.

#### a. PPh

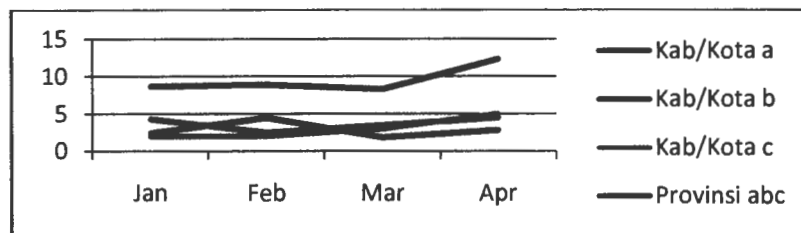
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) per Kab/Kota:



Uraian.....

#### b. PPN

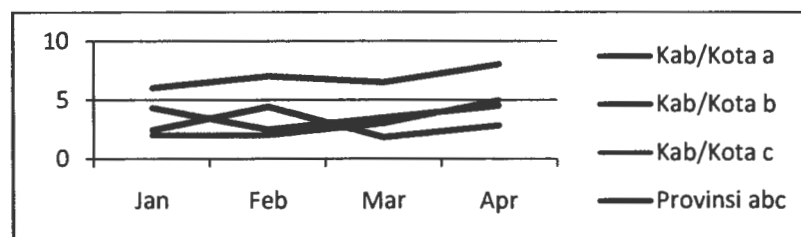
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per Kab/Kota:



Uraian.....

#### c. PPnBM

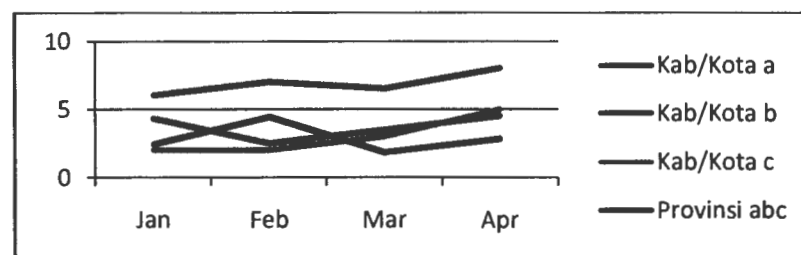
Penerimaan PPnBM per Kab/Kota:



Uraian.....

#### d. Cukai

Penerimaan Cukai per Kab/Kota:



Uraian.....

Uraian menyeluruh terkait penerimaan

pajak dan cukai termasuk kontribusi daerah tersebut terhadap penerimaan perpajakan secara nasional.....

Uraian mengenai penerimaan pajak/cukai yang mengalami tren naik dan tren turun.....

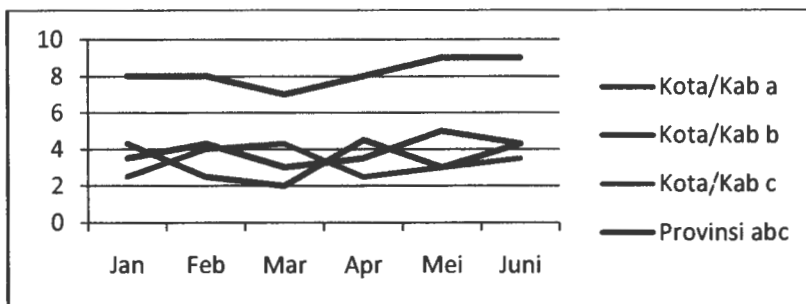
Grafik tren penerimaan perpajakan pada beberapa tahun

## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per Kab/Kota

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP adalah salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara. Data PNBP yang dapat disajikan adalah jenis PNBP yang berkontribusi signifikan atas PNBP daerah tersebut.

### a. Penerimaan PNBP a

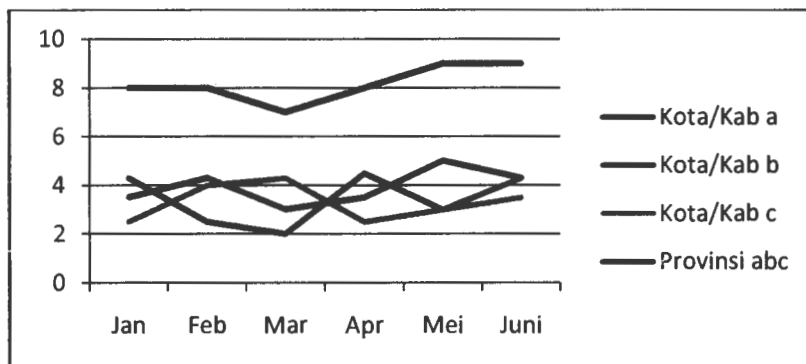
Adapun penerimaan PNBP a provinsi .... per Kab/Kota adalah sebagai berikut:



Uraian.....

### b. Penerimaan PNBP b

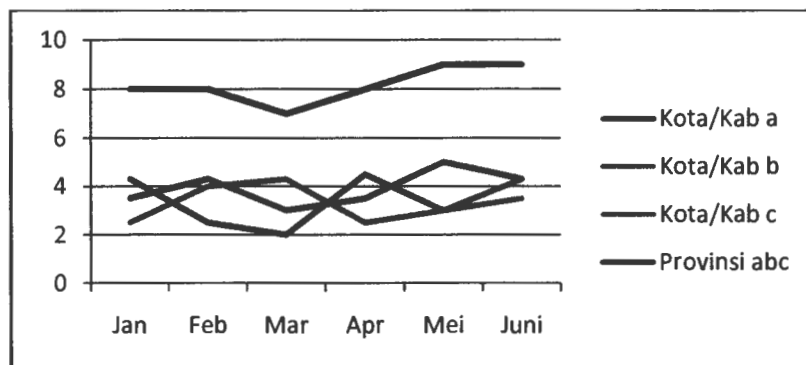
Adapun penerimaan PNBP b provinsi .... per Kab/Kota adalah sebagai berikut:



Uraian.....

### c. Penerimaan PNBP c

Adapun penerimaan PNBP c provinsi .... per Kab/Kota adalah sebagai berikut:



Uraian.....

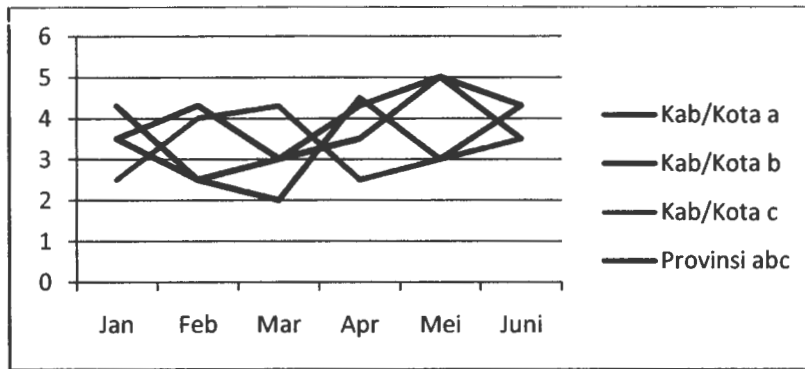
Quote berita pajak regional ditambah dengan grafiknya

Quote berita penerimaan PNBP utamapadadaerah/provinsitersebut ditambah dengan grafiknya

3. **Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

a. **Penerimaan Pajak Daerah**

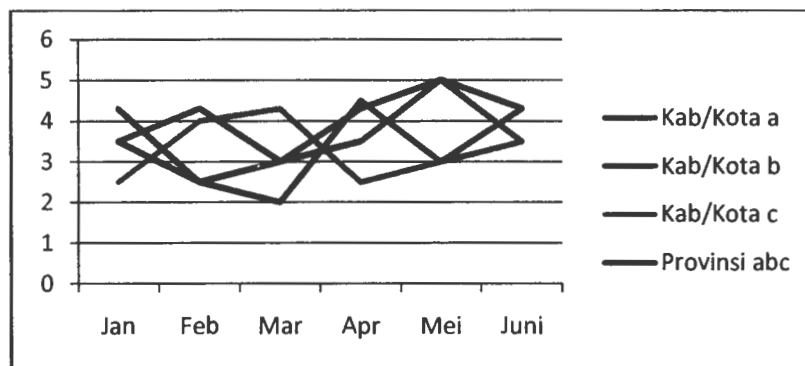
Adapun penerimaan Pajak Daerah lingkup provinsi ....per Kab/kota adalah sebagai berikut:



Uraian.....  
.....  
.....  
.....

b. **Penerimaan Retribusi Daerah**

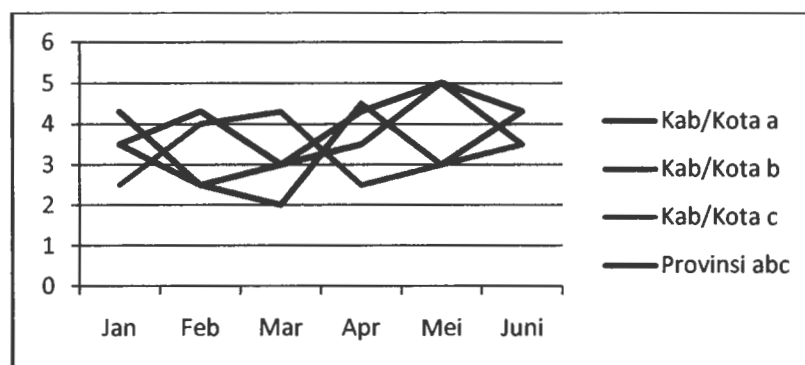
Adapun penerimaan Retribusi Daerah lingkup provinsi ....per Kab/Kota adalah sebagai berikut:



Uraian.....  
.....  
.....  
.....

c. **Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Adapun penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan lingkup provinsi ....per Kab/Kota adalah sebagai berikut:



Uraian.....  
.....  
.....  
.....

Quote berita Pajak Daerah/Retribusi Daerah/ Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditambah dengan grafiknya

### 1. Belanja Pemerintah Pusat

*Grafik tren realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal*

Uraian.....

*Grafik tren realisasi belanja Transfer*

Uraian.....

Uraian.....

**Grafik mengenai BLU dan PNPB**

Uraian.....

*Grafik mengenai investasi pemerintah pusat*

Uraian.....

pl

## 2. Belanja Pemerintah Daerah

Informasi yang ditampilkan berupa data APBD agregat seluruh Pemda (Prov/kab/kota), dan/atau ditampilkan data APBD seluruh daerah (Prov/kab/kota) sepanjang tersedia. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Realisasi APBD 2014 s.d Bulan .....

<b>A. PENDAPATAN</b>			
PAD			
Dana Perimbangan			
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
<b>B.BELANJA</b>			
Belanja Tidak Langsung			
Belanja Langsung			
<b>C. PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

Uraian.....

Grafik tren PAD

Uraian.....

*Grafik tren realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal*

Uraian.....

**Grafik mengenai BLUD**

Uraian.....

**Grafik mengenai investasi pemerintah daerah**

Uraian.....

ll

D. Berita/Isu Fiskal Regional Terpilih

1. Judul Isu Fiskal Regional Terpilih 1

Uraian.....

Grafik terkait isu 1

Uraian.....

Grafik terkait isu 1

Uraian.....

Grafik terkait isu 2

2. Judul Isu Fiskal Regional Terpilih 2

Uraian.....

Uraian.....

Grafik terkait isu 2

Uraian.....

DIREKTUR JENDERAL,

  
MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP. 19590606 198312 1 001

LAMPIRAN II

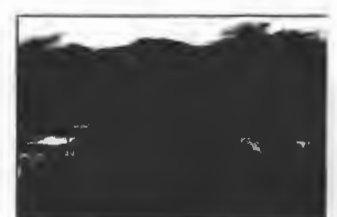
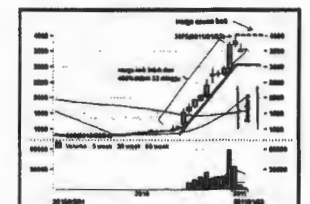
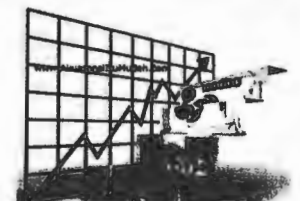
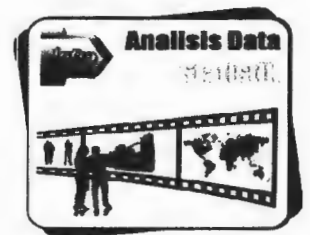
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR SE- 43 /PB/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYUSUNAN KAJIAN FISKAL REGIONAL







# PANDUAN ANALISIS DAN PENYAJIAN KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUNAN (ANNUAL REGIONAL FISCAL REPORT)



-2014-

# PENJELASAN MENGENAI PANDUAN PENYAJIAN DAN ANALISIS PENYUSUNAN KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUNAN

## Kajian Fiskal Regional

Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan (*Annual Regional Fiscal Report*) adalah salah 1 (satu) jenis kajian fiskal yang disusun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Panduan penyajian dan analisis penyusunan KFR memberikan informasi berupa contoh cara penyajian data dan analisis yang dapat digunakan dalam menyusun KFR.

Secara umum, tujuan KFR diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonomi seperti: (a) mendorong pertumbuhan ekonomi; (b) mencapai keseimbangan internal dimana tingkat permintaan agregat sama dengan tingkat penawaran agregat termasuk menekan angka pengangguran; dan (c) mencapai keseimbangan eksternal dimana terdapat kesinambungan neraca transaksi berjalan. Dengan demikian, informasi hasil analisis yang tertuang dalam KFR seyogyanya dapat menggambarkan analisis interaksi indikator fiskal dan makroekonomi yakni :

- (1) Analisis kebijakan fiskal dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian regional
- (2) Analisis ekonomi regional dan pengaruhnya terhadap efektivitas fiskal pemerintah regional

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka KFR setidaknya dapat menggambarkan kondisi fiskal regional (*fiscal condition*), kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), dan risiko fiskal (*fiscal risk*).

Sebagai suatu hasil kajian, informasi yang tertuang dalam KFR diarahkan untuk dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan secara luas seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, masyarakat (misalnya: investor, peneliti, mahasiswa dst), dan lembaga pengawas seperti DPRD. Khususnya bagi penyusun kebijakan, KFR memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses penyusunan dan implementasi kebijakan fiskal yang efektif. Sehingga, dalam tataran pengelolaan keuangan negara, KFR memiliki 2 (dua) tujuan penting untuk mendukung pencapaian fungsi APBN yakni fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi:

- (1) menyediakan informasi untuk penyusunan kerangka ekonomi makro yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal/penyusunan APBN/D, dan
- (2) sebagai alat analisis dan penilaian untuk mengetahui apakah kebijakan fiskal telah sesuai dengan tujuan-tujuan makroekonomi yang telah ditetapkan.

## Panduan Penyajian dan Analisis Penyusunan KFR

Mencermati esensi dari KFR sebagaimana yang diuraikan di atas dan dalam rangka mendorong kualitas KFR, maka diperlukan suatu panduan penyajian dan analisis penyusunan KFR.

Tujuan panduan penyajian dan analisis penyusunan KFR adalah:

- (1) sebagai pedoman bagi tim penyusun KFR di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam menyajikan dan melakukan analisis data dalam rangka penyusunan KFR;
- (2) memberikan contoh-contoh analisis indikator fiskal suatu daerah dengan cara mengaitkannya dengan indikator-indikator makroekonomi yang relevan terhadap kondisi fiskal tersebut, sehingga diperoleh gambaran kondisi fiskal regional yang komprehensif.

Panduan Penyajian dan Analisis Penyusunan KFR yang berupa contoh penyajian dan contoh analisis data digunakan baik dalam rangka penyusunan KFR Tahunan (*Annual Regional Fiscal Report*) yang membutuhkan analisis yang mendalam (*in-depth*), maupun penyusunan KFR

Triwulanan/semesteran (*Quarterly Regional Fiscal Report*) yang menyajikan indikator makroekonomi fundamental/indikator fiskal/indikator pembangunan dengan analisisnya secara umum. Perlu diperhatikan bahwa **panduan ini** bukanlah *template* analisis yang harus diikuti secara mutlak. Penyempurnaan, pengembangan, elaborasi dan modifikasi analisis sangat mungkin untuk dilakukan. Selayaknya sebuah analisis, maka harus memperhatikan relevansi dan konteks atas data maupun metodologi yang digunakan. Hal yang juga patut mendapat perhatian adalah adanya narasi atau elaborasi yang memadai atas hasil analisis yang didapat. Disamping itu, penggunaan ilustrasi dalam bentuk tabulasi maupun grafis akan sangat menentukan agar hasil analisis dapat lebih mudah dipahami.

## DAFTAR ISI

BAB I .....	- 7 -
PENDAHULUAN .....	- 7 -
A. LATAR BELAKANG .....	- 7 -
B. TUJUAN .....	- 7 -
C. RUANG LINGKUP .....	- 7 -
D. METODE PENELITIAN .....	- 7 -
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	- 7 -
BAB II .....	- 8 -
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL .....	- 8 -
A. INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL .....	- 8 -
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	- 8 -
2. Suku bunga .....	- 11 -
3. Inflasi .....	- 12 -
4. Nilai tukar .....	- 12 -
B. INDIKATOR PEMBANGUNAN .....	- 12 -
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ <i>Human Development Index</i> (HDI) .....	- 12 -
2. Tingkat Kemiskinan .....	- 13 -
3. Ketimpangan ( <i>Gini Ratio</i> ) .....	- 13 -
4. Kondisi Ketenagakerjaan .....	- 13 -
BAB III .....	- 14 -
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL .....	- 14 -
A. APBN TINGKAT PROVINSI .....	- 14 -
B. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI .....	- 14 -
1. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi .....	- 14 -
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi .....	- 15 -
C. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI .....	- 18 -
1. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Organisasi (Bagian Anggaran/ Kementerian/ Lembaga) .....	- 18 -
2. Perkembangan pagu dan realisasi berdasarkan Fungsi .....	- 18 -
3. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja .....	- 19 -
D. TRANSFER KE DAERAH .....	- 25 -
E. PENGELOLAAN BLU PUSAT .....	- 26 -
1. Profil dan jenis layanan satker BLU pusat .....	- 26 -
2. Perkembangan pengelolaan aset, PNPB dan RM BLU pusat .....	- 27 -
3. Kemandirian BLU .....	- 27 -
4. Profil dan jenis layanan satker PNPB .....	- 27 -
5. Potensi satker PNPB menjadi satker BLU .....	- 28 -
F. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT .....	- 31 -
1. Penerusan pinjaman .....	- 31 -
2. Kredit program .....	- 32 -
BAB IV .....	- 36 -
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD .....	- 36 -
A. APBD TINGKAT PROVINSI .....	- 36 -
B. JENIS PENDAPATAN DALAM APBD .....	- 36 -
C. JENIS BELANJA DALAM APBD .....	- 38 -
1. Rincian Belanja Daerah Berdasarkan klasifikasi urusan .....	- 38 -
2. Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) .....	- 38 -
D. PENGELOLAAN BLU DAERAH .....	- 40 -
1. Profil dan jenis layanan satker BLU daerah .....	- 40 -
2. Perkembangan pengelolaan aset, PNPB dan RM BLU Daerah .....	- 41 -
3. Analisis legal .....	- 41 -
E. PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH .....	- 41 -
1. Bentuk Investasi Daerah .....	- 41 -
2. Profil dan jenis Badan Usaha Milik Daerah .....	- 42 -

F. SILPA DAN PEMBIAYAAN .....	- 42 -
1. Perkembangan surplus/defisit APBD .....	- 42 -
2. Pembiayaan daerah .....	- 43 -
G. CONTOH ANALISIS LAINNYA .....	- 44 -
1. Analisis Horizontal dan Vertikal .....	- 44 -
2. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah .....	- 45 -
BAB V .....	- 46 -
KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL .....	- 46 -
1. Pertanian .....	- 47 -
2. Pariwisata .....	- 47 -
3. Kelautan dan Perikanan .....	- 47 -
4. Kehutanan .....	- 48 -
5. Peternakan .....	- 49 -
6. Pertambangan .....	- 49 -
BAB VI .....	- 50 -
ANALISIS TANTANGAN FISKAL DAERAH/REGIONAL .....	- 50 -
BAB VII .....	- 51 -
PENUTUP .....	- 51 -
A. KESIMPULAN .....	- 51 -
B. REKOMENDASI .....	- 51 -
DAFTAR PUSTAKA .....	- 52 -

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, metode (data dan alat analisis) dan hal lainnya yang dapat digunakan pembaca laporan dalam memahami konteks dan asumsi serta analisis laporan.

### **A. LATAR BELAKANG**

Berisi tentang alasan dan signifikansi penyusunan Kajian Fiskal Regional serta informasi lainnya yang membantu pembaca dalam memahami bab-bab selanjutnya.

### **B. TUJUAN**

Berisi tentang tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan/penyajian Kajian Fiskal Regional dan manfaatnya bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dapat juga disajikan tujuan khusus jika ada/diperlukan.

### **C. RUANG LINGKUP**

Berisi tentang ruang lingkup atau cakupan kajian serta keterbatasan yang berkaitan dengan penyusunan Kajian Fiskal Regional.

### **D. METODE PENELITIAN**

Berisi tentang penjelasan mengenai pendekatan yang diambil dalam melakukan penelitian/analisis/kajian berupa metode/pengumpulan data (primer dan/atau sekunder), dan metode/teknik analisis data.

### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berisi tentang sistematika Kajian Fiskal Regional beserta penjelasan/gambaran ringkas mengenai hal yang dibahas dalam bab tersebut.

## BAB II

### PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

#### A. INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL

##### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten /kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). Tujuan analisis PDRB yaitu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah termasuk di dalamnya tingkat kesejahteraan penduduk dan gambaran perekonomian di daerah tersebut secara umum. Data pertumbuhan ekonomi (PDRB) dapat disajikan dalam laju pertumbuhan PDRB, nominal PDRB dan PDRB per kapita. Data yang disajikan meliputi PDRB berdasarkan harga konstan dan/atau harga berlaku. Penyajian data tersebut kemudian diikuti dengan analisisnya.

##### a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Laju Pertumbuhan PDRB di Propinsi xxx (dalam %)  
(berdasarkan harga konstan dan/atau harga berlaku)\*

Wilayah	Tahun XXXX-1				Tahun XXXX			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Prov								
Kab...								
Kota..								
Nasional								

Sumber: BPS, BI, atau sumber lain yang relevan

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur misalnya dengan cara membandingkan PDRB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, dapat dielaborasi lebih jauh terkait variabel yang paling besar peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut serta seberapa besar porsi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dalam skala nasional.

##### b. Nominal PDRB

Nilai nominal PDRB dapat dilihat dari sisi permintaan maupun sisi penawaran, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1) PDRB sisi permintaan

Informasi mengenai perkembangan PDRB dari sisi permintaan bermanfaat untuk mengetahui peran atau kontribusi pengeluaran pemerintah (APBN dan APBD) kepada pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian dapat diketahui daerah-daerah mana yang tingkat ketergantungannya tinggi kepada anggaran pemerintah (dukungan sektor swasta masih kurang). Disamping itu, juga dapat diketahui daerah-daerah yang tingkat investasinya relatif masih rendah.

Provinsi : .....

Sumber	Tahun XXXX			
	I	II	III	IV
Konsumsi Rumah Tangga				
Investasi Sektor Bisnis/Swasta				
Pengeluaran Pemerintah				
Ekspor-impor				

Sumber: BPS, BI, atau sumber lain yang relevan

Pembentuk PDRB dilihat dari sisi permintaan merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) konsumsi, (2) investasi, (3) pengeluaran pemerintah, dan (4) ekspor *netto* (ekspor dikurangi impor).

Data komponen permintaan pembentuk PDRB selanjutnya perlu dikaji untuk mengetahui proporsinya terhadap PDRB. Disamping itu, faktor-faktor yang mempengaruhi elemen pembentuk PDRB perlu dianalisis lebih lanjut, utamanya faktor-faktor yang berasal dari perkembangan indikator makroekonomi.

#### a) Konsumsi

Konsumsi yang digunakan sebagai indikator makro ekonomi dalam hal ini adalah jumlah/besarnya pengeluaran rumah tangga, berupa pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Porsi belanja konsumsi umumnya merupakan komponen terbesar dari pembentuk (PDB/PDRB), namun demikian diperlukan analisis untuk menjustifikasi komponen pembentuk utama PDRB yang mungkin berasal dari komponen lainnya.

Analisis atas komponen pembentuk PDRB diperlukan untuk mengetahui sumber pendorong perekonomian yang utama, yang mana investasi (pembentukan modal) diarahkan untuk menjadi pendorong utama perekonomian regional karena dampaknya terhadap perekonomian regional. Untuk wilayah yang komponen pembentuknya berasal dari konsumsi maka perubahan (kenaikan/penurunan) nilai konsumsi akan sangat mempengaruhi besaran PDRB. Artinya, dengan tingkat konsumsi yang tinggi, maka kegiatan perekonomian akan bergairah sehingga pendapatan perkapita juga meningkat yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, jika konsumsi tidak dikendalikan dan menjadi sangat tinggi, maka porsi/bagian pendapatan yang dialokasikan untuk investasi dan *saving* menjadi menurun. Akibatnya, uang beredar terlalu banyak sehingga memicu kenaikan tingkat inflasi, laju produksi dan kegiatan perekonomian akan melambat, pengangguran bertambah yang nantinya dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan rakyat dan bertambahnya tingkat kemiskinan.

#### b) Investasi

Investasi adalah pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk tujuan produksi dimasa yang akan datang (barang produksi) yang terjadi disuatu daerah/kawasan tertentu. Besarnya tingkat investasi ini antara lain sangat dipengaruhi oleh tingkat pengembalian modal dan tingkat bunga. Investor cenderung berinvestasi jika tingkat pengembalian modal lebih besar daripada suku bunga. Jika terjadi kondisi sebaliknya, investor cenderung memilih berinvestasi pada tabungan atau deposito untuk memperoleh keuntungan dari tingkat bunga yang lebih tinggi.

Analisis terhadap investasi perlu dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contoh analisis yang dapat dilakukan diantaranya untuk mengetahui dampak terjadinya investasi terhadap perekonomian suatu daerah. Jika investasi naik, produksi akan meningkat, begitu juga dengan



pendapatan perkapita, kesejahteraan dan perekonomian akan membaik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi jumlah/besarnya nilai investasi swasta, misalnya besaran tarif pajak dan kebijakan pemerintah terkait dengan penentuan jumlah belanja/pengeluarannya.

#### c) **Pengeluaran Pemerintah**

Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD maupun alokasi dana APBN di daerah (DIPA kewenangan kantor pusat K/L, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) merupakan salah satu variabel pendorong pertumbuhan PDRB, disamping variabel pendorong lainnya seperti konsumsi dan investasi. Pengeluaran Pemerintah adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatannya, yang secara umum terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran cicilan bunga dan utang, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja hibah, dan belanja lain-lain.

Analisis Pengeluaran Pemerintah dilakukan dalam konteks kondisi ekonomi regional yang dicerminkan dalam indikator makroekonomi fundamental. Contohnya, dalam kondisi terjadinya inflasi yang tinggi (uang beredar terlalu banyak), maka G seyogyanya ditekan dalam rangka mencapai keseimbangan internal dan menentukan suku bunga yang tepat. Namun demikian, sebagai konsekuensi adanya tekanan/pengurangan G, maka kegiatan ekonomi berpotensi menjadi lesu, perekonomian melambat dan akibatnya PDRB dapat menurun.

#### d) **Ekspor dan Impor**

Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan untuk dapat dijual di luar negeri atau dengan kata lain adalah kegiatan menjual barang/jasa ke luar negeri. Sedangkan yang dimaksud impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan untuk di jual di dalam negeri, atau dengan kata lain adalah kegiatan membeli barang/jasa dari luar negeri. Selisih antara ekspor dan impor itulah yang disebut ekspor netto.

Pada dasarnya, tujuan dilakukannya kegiatan ekspor-impor tersebut adalah untuk menghasilkan devisa dan/atau memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau tidak cukup tersedia di dalam negeri. Sebagai contoh, suatu daerah melakukan ekspor barang migas dan nonmigas (hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan) yang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan melebihi kebutuhan rakyat. Disisi lain, daerah tersebut perlu membeli mesin produksi dengan teknologi canggih dan barang modal lainnya yang belum dapat diproduksi di daerahnya. Dari hasil kegiatan ekspor impor itu, dapat diketahui atau dihitung nilai masing-masing ataupun selisih antara keduanya. Nilai inilah yang akan berpengaruh pada neraca perdagangan/pembayaran, menentukan besarnya devisa yang diperoleh, dan mempengaruhi cadangan devisa suatu daerah ataupun secara nasional.

Analisis ekspor dan impor antara lain dilakukan dengan membandingkan komponen ekspor dan impor. Analisis pertumbuhan/penurunannya dapat dikaji dengan melihat perkembangan ekonomi di negara tujuan atau analisis kontekstual lainnya, sehingga dapat diketahui penyebab dan implikasinya terhadap fiskal regional (yang datanya dapat diperoleh dari sumber-sumber yang relevan). Ekspor netto (ekspor dikurangi impor) harus dijaga dalam rangka mencapai keseimbangan eksternal, yaitu selisih neraca perdagangan dan pembayaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam melakukan antisipasi terkait kebijakan perdagangan nasional/daerah. Kebijakan ekspor-impor dapat dipakai untuk menjaga nilai tukar ataupun pemanfaatan cadangan devisa yang secara umum dapat mempengaruhi perekonomian negara.

## 2) PDRB sisi penawaran

Pembentuk PDRB dari sisi penawaran merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dipakai/terlibat dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Informasi mengenai perkembangan PDRB dari sisi penawaran bermanfaat untuk mengetahui peran atau kontribusi sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian dapat dianalisis secara indikatif antara sektor ekonomi yang menjadi unggulan dan keterkaitannya dengan fokus kebijakan fiskal (anggaran) pemerintah pada sektor-sektor tersebut.

Provinsi : .....

Sumber	Tahun XXXX			
	I	II	III	IV
Sektor Industri pengolahan				
Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan				
Sektor pertambangan				
dst				

Sumber: BPS, BI, atau sumber lain yang relevan

### c. PDRB per kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan penduduk suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk regional tersebut.

Tujuan analisis Pendapatan per kapita adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur tingkat kemajuan wilayah atau kawasan di bidang perekonomian serta tingkat pemerataan pembangunan guna mencapai keadilan dan kemakmuran.
- 2) Untuk memperoleh taksiran tentang nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat dalam satu tahun.
- 3) Untuk mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat perekonomian suatu kawasan regional.
- 4) Untuk membantu membuat rencana dan melaksanakan program-program pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan suatu kawasan.

Analisis terhadap pendapatan per kapita seyogyanya tidak terpaku pada analisis atas nilai pendapatan per kapita saja. Perlu juga dilakukan analisis lebih lanjut seperti sebarannya dari pendapatan untuk mengetahui tingkat pemerataan kemakmuran, atau terdapat ketimpangan kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah (terdapat gap yang besar dalam jumlah penghasilan masyarakat secara riil).

## 2. Suku bunga

Suku bunga merupakan persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu. Kebijakan terkait suku bunga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan laju inflasi, dan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Suku bunga/tingkat bunga mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yang tentunya juga akan menentukan tingkat inflasi.

Hal yang perlu diperhatikan adalah analisis terhadap sejauh mana perubahan tingkat suku bunga akan berpengaruh pada indikator makroekonomi lainnya seperti tingkat inflasi dan investasi regional. Misalnya, suku bunga yang ditetapkan/berlaku di perbankan (tingkat bunga nominal) naik sebesar 1%, maka sejauh mana tingkat inflasi akan terpengaruh. Selisih antara suku bunga nominal dan tingkat inflasi (tingkat bunga riil) inilah yang akan menentukan apakah perubahan suku bunga tersebut berdampak positif atau negatif bagi perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilakukan analisis untuk menilai apakah kebijakan terkait suku bunga efektif untuk mempengaruhi tingkat inflasi

pada periode tertentu. Jika inflasi terlalu tinggi dan jumlah uang beredar terlalu banyak, maka dapat ditempuh kebijakan menaikkan suku bunga untuk merangsang masyarakat menyimpan/menabung uangnya di bank, sekaligus menahan/membatasi keinginan swasta untuk mengajukan kredit/pinjaman; dengan demikian jumlah uang beredar dapat dikurangi (dan berlaku sebaliknya). Akibatnya, tingkat inflasi akan dapat dikendalikan sesuai tingkat yang diharapkan dan kembali stabil.

### **3. Inflasi**

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi dapat dilihat melalui data statistik harga-harga dan statistik harga konsumen terutama yang telah disusun dalam bentuk indeks. Inflasi dapat digunakan sebagai alat untuk melihat seberapa besar tingkat kestabilan harga yang terjadi di suatu daerah. Selanjutnya analisis terhadap inflasi dan sumber penyebabnya dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pemerintah atas kebijakan yang perlu diambil terutama dalam rangka penataan laju perekonomian secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **4. Nilai tukar**

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan unit mata uang negara lain. Tujuan analisis nilai tukar adalah untuk mengetahui nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang mempengaruhi indikator ekonomi lainnya khususnya terkait dengan neraca perdagangan/pembayaran, kegiatan ekspor-impor, dan cadangan devisa.

Sebagai contoh, jika terjadi depresiasi nilai tukar IDR terhadap USD, maka diperlukan jumlah IDR yang lebih besar untuk ditukarkan dengan USD. Pada saat terdapat kebutuhan transaksi dengan menggunakan USD sangat besar, maka hal tersebut akan meningkatkan beban pemerintah dan/atau swasta. Kebutuhan USD dalam jumlah besar pada suatu saat dapat menyebabkan cadangan devisa (dalam bentuk USD) berkurang drastis, sehingga berpotensi mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

## **B. INDIKATOR PEMBANGUNAN**

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Indikator pembangunan adalah indikator yang dapat menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan, dalam hal ini ketercapaian tujuan fiskal. Indikator pembangunan antara lain, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, gini ratio, kondisi ketenagakerjaan (antara lain tingkat pengangguran).

Disamping fungsinya sebagai penilaian atas keberhasilan pembangunan atau menganalisis apakah kebijakan fiskal tercapai atau tidak, indikator pembangunan dapat juga dijadikan dalam membantu menggali dan memahami konteks regional yang diperlukan dalam membantu melakukan analisis perekonomian regional.

### **1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI)**

Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Indikator yang digunakan untuk mengukur IPM adalah :

- a. Tingkat harapan hidup
- b. Tingkat melek huruf masyarakat

c. Pendapatan riil perkapita berdasarkan daya beli masing-masing negara

Angka IPM menggambarkan secara komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Indeks HDI ini besarnya antara 0 sampai dengan 1,0. Apabila angka indeks yang diperoleh dari suatu regional mendekati 1, maka HDI di regional tersebut semakin tinggi. Sedangkan, apabila angka indeks mendekati 0, maka regional tersebut memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah.

Contoh analisis IPM adalah membandingkan antara belanja APBD dalam beberapa tahun dengan nilai IPM atau data-data lain yang lebih detail/rinci misalnya belanja pendidikan dikaitkan dengan tingkat melek huruf masyarakat. Selanjutnya dikaitkan pula faktor-faktor penyebab rendahnya/tingginya nilai IPM dilihat dari kondisi fiskal dan ekonomi regional.

## 2. Tingkat Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja, tetapi juga terjadi perbaikan kualitas hidup penduduk miskin.

Selanjutnya untuk melakukan analisis indikator tingkat kemiskinan secara lebih rinci dapat digunakan presentase penduduk miskin dengan menggunakan *Headcount index*. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

## 3. Ketimpangan (*Gini Ratio*)

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini di bawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien Gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap tinggi atau sangat timpang, apabila koefisien Gini di atas 0,5.

## 4. Kondisi Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan antara lain dengan statistik angkatan kerja, jumlah pengangguran dan sebagainya.

Contoh analisis Angkatan Kerja:

Penduduk yang dikatakan angkatan kerja adalah orang yang telah berumur 15-64 tahun. Angkatan kerja ini juga dibagi lagi menjadi dua yakni bekerja dan sedang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan angkatan kerja adalah, partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan.

Analisis kondisi ketenagakerjaan dapat pula dikaitkan dengan indikator kriminalitas. Di negara berkembang, banyak terjadi kriminalitas yang disebabkan beberapa faktor seperti adanya *cultural shock*, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan karena pengangguran. Indikator kriminalitas itu sendiri diantaranya adalah, jumlah pencurian per tahun, jumlah pembunuhan per tahun, dan jumlah pemerkosaan per tahun.

### BAB III

## PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL

Bagian ini menjelaskan perkembangan APBN Tingkat Provinsi, Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Pengelolaan BLU Pusat, dan Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat dan contoh analisisnya.

### A. APBN TINGKAT PROVINSI

APBN tingkat provinsi merupakan potret kondisi keuangan di provinsi tersebut. *I-account* APBN dapat mencerminkan juga kebijakan fiskal yang diterapkan di masing-masing provinsi.

APBN Provinsi xxx (dalam miliar rupiah)

Pendapatan Perpajakan				
Pendapatan Bukan Pajak				
Hibah				
Belanja Pemerintah Pusat				
Transfer ke Daerah				
Pembiayaan Dalam negeri				
Pembiayaan Luar Negeri				

Sumber: Data LKPP UAPPAW atau sumber lain yang relevan

### B. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI

Pendapatan pemerintah pusat terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP

#### 1. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Tujuan analisis penerimaan perpajakan adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan perpajakan yang dihasilkan dalam suatu daerah/regional terhadap penerimaan perpajakan secara nasional, untuk mengukur besarnya penerimaan perpajakan yang berasal dari hasil investasi di daerah/regional tersebut, dan mengetahui potensi pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan perpajakan yang dibagikan kepada daerah/regional tersebut.

**Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi di Provinsi xxx**  
(dalam miliar Rupiah)

Penerimaan Perpajakan	Target Semester... Tahun XXXX-1	Realisasi Semester... Tahun XXXX-1	Target Semester... Tahun XXXX	Realisasi Semester... Tahun XXXX
PPh Perseorangan				
PPh Badan				
PPN				
dst				

Sumber: Data LKPP UAPPAW, Data Kanwil DJP, Data Kanwil DJBC atau sumber lain yang relevan

Contoh analisis penerimaan perpajakan:

- a. Analisis pajak biasanya dimulai dengan analisis *tax ratio* atau rasio pajak terhadap PDRB. Analisis *tax ratio*, contohnya, jika *tax ratio* meningkat dapat dikaji lebih lanjut penyebab peningkatan tersebut. Apakah karena adanya kenaikan tarif, intensifikasi / ekstensifikasi pajak, atau meningkatnya investasi dst.
- b. Analisis pajak secara umum dapat dilakukan dengan cara mengaitkannya dengan kondisi ekonomi nasional maupun global. Misalnya terkait krisis ekonomi yang mengglobal beberapa tahun belakangan berpotensi atau mungkin telah berdampak pada menurunnya penerimaan dari PPN-BM dan Bea Keluar. Misalnya, PPh menurun, maka perlu dikaitkan dengan kondisi ekonomi regional dan iklim investasi. Apakah terdapat kebijakan perpajakan seperti insentif atau dis-insentif pajak, atau penurunan PPh lebih dipengaruhi oleh meningkatnya atau menurunnya angkatan kerja. Lebih jauh dapat dikaitkan pula akibat dari penurunan penerimaan pajak yang disebabkan oleh berbagai faktor tersebut dengan terjadinya defisit anggaran serta upaya untuk memperbaiki/meningkatkan penerimaan pajak diwaktu yang akan datang.
- c. Analisis perbandingan data realisasi pendapatan pajak dengan adanya perbedaan sudut pandang pencatatan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) selaku Kuasa BUN yang mencatat realisasi pendapatan pajak berdasarkan pendapatan pajak yang diterima di wilayah setempat dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku fiskus yang mencatat realisasi pajak berdasarkan kode NPWP dalam lingkup KPP setempat. Untuk selanjutnya dapat dianalisis lebih jauh, apakah terdapat potensi pendapatan pajak yang dapat ditingkatkan sehubungan dengan perbedaan tersebut misalnya PPh yang jika dibandingkan ternyata jauh lebih besar PPh yang dicatat oleh DJPBN sehingga terdapat potensi bagi hasil PPh yang seharusnya dapat diterima lebih besar oleh pemerintah daerah setempat jika terdapat kebijakan khusus terhadap wajib pajak di daerah tersebut

## **2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Propinsi**

Selain dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak saat ini juga telah mulai diperhitungkan untuk dijadikan andalan dalam memaksimalkan penerimaan negara. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian

laba BUMN, PNBPN lainnya serta pendapatan BLU. Selain penggolongan menurut jenisnya, dikenal juga adanya PNBPN Fungsional.

### 1. Perkembangan PNBPN menurut Jenis

Penerimaan negara bukan pajak dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu: penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Penerimaan Bukan Pajak Lainnya serta Pendapatan BLU.

Penerimaan PNBPN Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi di Provinsi xxx  
(per Jenis PNBPN dalam miliar Rupiah)

Penerimaan PNBPN	Target Semester... Tahun XXXX-1	Realisasi Semester... Tahun XXXX-1	Target Semester... Tahun XXXX	Realisasi Semester... Tahun XXXX
SDA				
Bag. Pemerintah atas Laba BUMN				
Lainnya				
dst				

Sumber: Data LKPP UAPPAW atau sumber lain yang relevan

### 2. Perkembangan PNBPN Fungsional

Penerimaan negara bukan pajak juga dapat dibedakan sesuai dengan fungsi kementerian lembaga yang disebut dengan PNBPN Fungsional. PNBPN Fungsional adalah penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Beberapa lembaga memiliki PNBPN sesuai dengan layanan yang dilakukan seperti Biaya pembuatan SIM dan denda tilang di Polri, ijin HPH di Kementerian Kehutanan, Biaya Persidangan/Perkara di Mahkamah Agung, Biaya Nikah Talak Rujuk dan Cerai (NTPCR) di Kementerian Agama..

Penerimaan PNBPN Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi di Provinsi xxx  
(menurut Fungsional Kementerian/Lembaga dalam miliar Rupiah)

Penerimaan PNBPN	Target Semester... Tahun XXXX-1	Realisasi Semester... Tahun XXXX-1	Target Semester... Tahun XXXX	Realisasi Semester... Tahun XXXX
Ijin HPH				
NTPCR				
SIM				
dst				

Sumber: Data LKPP UAPPAW atau sumber lain yang relevan

Tujuan analisis penerimaan PNBPN untuk mengetahui kontribusi penerimaan PNBPN yang dihasilkan dalam suatu daerah/regional terhadap penerimaan PNBPN secara nasional.



Contoh analisis penerimaan PNBPN antara lain:

1. Analisis mengenai PNBPN fungsional yang terkadang terjadi deviasi yang cukup besar antara target dengan realisasi.
2. Analisis mengenai nilai Maksimum Pencairan (MP) PNBPN yang dibandingkan dengan pagu PNBPN yang ada di DIPA selama satu tahun anggaran, apakah terjadi perubahan target PNBPN selama tahun berjalan untuk kemudian dapat dianalisis untuk melihat adanya indikasi satker atau K/L yang berusaha menambah pagu DIPA-nya.
3. Analisis mengenai PNBPN yang nilainya cukup signifikan di daerah setempat, apakah dapat dikaitkan dengan potensi yang ada di wilayah setempat. Misalnya PNBPN yang signifikan berasal dari sumber daya hutan yang dapat dihubungkan dengan besarnya potensi hutan yang dapat dikelola oleh pemegang HPH dan dapat menunjukkan tingginya ketergantungan wilayah setempat dari sektor kehutanan. Atau dapat pula dilakukan analisis kontradiktif, misalnya kecilnya PNBPN dari sektor perikanan, sementara jika dilihat berdasarkan data BPS, ternyata sektor perikanan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat.
4. Analisis mengenai dasar hukum pengenaan jenis dan tarif PNBPN yang diberlakukan pada satker K/L, untuk memastikan apakah jenis dan tarif sudah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku atau berdasarkan produk hukum lainnya.

Selanjutnya penerimaan perpajakan dan PNBPN tersebut di atas dapat dikembangkan analisisnya sebagai berikut:

1. Analisis kontribusi pendapatan terhadap ekonomi regional, untuk mengetahui kontribusi kemampuan fiskal pemerintah melalui penerimaan pusat/daerah kepada pertumbuhan ekonomi regional. Analisis dapat dilakukan melalui tabulasi rasio-rasio yang memperbandingkan pendapatan (pusat dan daerah) dengan PDRB. Rasio-rasio ini kemudian dapat diperbandingkan antar daerah (prov/kab/kota).

Contoh :

Tabel XX

Daerah	Perpajakan / PDRB	PNBP / PDRB	PAD/PDRB
Prov.....*			
Kab.....			
Kota...			

\*Angka pendapatan perpajakan/PNBPN/PAD yang dihitung adalah akumulasi pendapatan dalam APBD Provinsi dan seluruh APBD Kab/Kota

Cara lain adalah melalui ilustrasi grafis dengan menggunakan *scatter plot* untuk menggambarkan korelasi sederhana antara pendapatan dan PDRB antar daerah.

2. Analisis kontribusi populasi terhadap pendapatan pemerintah, untuk mengetahui kontribusi populasi/penduduk terhadap pendapatan pusat/daerah. Analisis dapat dilakukan melalui tabulasi rasio-rasio yang memperbandingkan pendapatan (pusat dan daerah) dengan populasi. Rasio-rasio ini kemudian dapat diperbandingkan antar daerah (prov/kab/kota).



Contoh :

Tabel XX

Daerah	Perpajakan** / Populasi	PNBP / Populasi	PAD/ Populasi
Prov.....*			
Kab....			
Kota...			

\*Angka pendapatan perpajakan/PNBP/PAD yang dihitung adalah akumulasi pendapatan dalam APBD Provinsi dan seluruh APBD Kab/Kota

\*\*Agar lebih menggambarkan tax ratio, angka yang ditampilkan adalah berdasarkan pendapatan pajak dari seluruh KPP dalam wilayah tersebut.

Cara lain adalah melalui ilustrasi grafis dengan menggunakan scatter plot untuk menggambarkan korelasi sederhana antara pendapatan dan populasi antar daerah.

### C. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI

Belanja pemerintah pusat adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pengeluaran pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

Belanja pemerintah merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal. Salah satunya yang populer pada saat krisis ekonomi adalah instrumen ekonomi berupa stimulus fiskal. Secara garis besar, komposisi dari stimulus fiskal adalah berupa pengurangan beban pajak dan tambahan belanja pemerintah (*increased spending*).

#### 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Organisasi (Bagian Anggaran/ Kementerian/ Lembaga)

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/ lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara

Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Bagian Anggaran  
di Propinsi xxx (dalam miliar rupiah)

Kementerian/Lembaga	Pagu Tahun XXXX-1	Realisasi Tahun XXXX-1	Pagu Tahun XXXX	Realisasi Tahun XXXX
BPK				
MA				
Kejaksaan Agung				
dst				

Sumber: Data LKPP UAPPAW atau sumber lain yang relevan

#### 2. Perkembangan pagu dan realisasi berdasarkan Fungsi

Belanja pemerintah pusat juga dapat dibagi menjadi 11 fungsi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan sosial.

Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi  
di Provinsi xxx (dalam miliar rupiah)

Kementerian/Lembaga	Pagu Tahun XXXX-1	Realisasi Tahun XXXX-1	Pagu Tahun XXXX	Realisasi Tahun XXXX
Pelayanan Umum				
Pertahanan				
Ketertiban dan Keamanan				
dst				

Sumber: Data LKPP UAPPAW atau sumber lain yang relevan

### 3. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

Menurut jenisnya belanja pemerintah pusat terdiri dari 8 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja  
di Provinsi xxx (dalam miliar rupiah)

Kementerian/Lembaga	Pagu Tahun XXXX-1	Realisasi Tahun XXXX-1	Pagu Tahun XXXX	Realisasi Tahun XXXX
Bel Pegawai				
Bel Barang				
Bel Modal				
dst				

Sumber: Data LKPP UAPPAW atau sumber lain yang relevan

Contoh analisis belanja pemerintah pusat:

1. Pada dasarnya yang ingin diketahui adalah arah dan sensitifitas dari kebijakan fiskal pemerintah daerah yang tercermin dari belanja APBD. Untuk itu analisis dilakukan dengan memperbandingkan belanja APBD dengan beberapa indikator seperti contoh di bawah ini:

a. Perbandingan dengan Belanja APBN,

- 1) Non Belanja pegawai, Untuk mengetahui proporsi sumber dana (non belanja pegawai) yang dikelola oleh pemerintah daerah, maka dapat diperbandingkan dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan belanja non pegawai pada APBD dengan formula :

$$\text{Rasio pengelolaan belanja pegawai} = \frac{\text{Belanja APBN (DK+TP+UB)}}{\text{Belanja non pegawai APBD}}$$

- 2) Belanja modal, indikator ini dimaksudkan untuk membandingkan belanja modal yang bersumber dari APBN dan APBD yang merupakan motor pertumbuhan regional, dengan formula:

$$\text{Rasio Belanja Modal APBN-APBD} = \frac{\text{Belanja Modal APBN (KP/KD/DK/TP/UB)}}{\text{Belanja Modal APBD}}$$

- b. Perbandingan dengan populasi, indikator ini cenderung berfungsi sebagai perbandingan spasial antar wilayah, untuk mendapatkan proporsi antara kebijakan fiskal yang tercermin dari anggaran dengan indikator demografis (populasi). Sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih fair besaran anggaran pada suatu wilayah. Formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja terhadap populasi} = \frac{\text{Total Belanja APBD} + \text{APBN}}{\text{Jumlah populasi}}$$

- c. Perbandingan total belanja dengan belanja tertentu

- 1) Belanja pegawai APBD, untuk mengetahui seberapa besar proporsi APBD yang digunakan untuk membayar belanja pegawai maka digunakan formula:

$$\text{Rasio Belanja Pegawai} = \frac{\text{Belanja pegawai APBD}}{\text{Total belanja APBD}}$$

- 2) Belanja modal infrastruktur, rasio ini untuk mengetahui tingkat fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal infrastruktur, yang tercermin dari proporsi alokasi belanja modal dari belanja pada APBD maka digunakan formula.

$$\text{Rasio Belanja Modal APBN-APBD} = \frac{\text{Belanja Modal APBN (KP/KD/DK/TP/UB)}}{\text{Belanja Modal APBD}}$$

- d. Perbandingan dengan sektor ekonomi unggulan, indikator ini cenderung berfungsi sebagai perbandingan secara indikatif antara fokus anggaran pemerintah dengan kontribusi sektor-sektor ekonomi unggulan kepada pertumbuhan. Contoh formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja sektoral terhadap kontribusi sektor kepada PDRB} = \frac{(\text{Belanja Sektor XXX} / \text{Total Belanja APBD} + \text{APBN})}{(\text{Kontribusi Sektor XXX} / \text{Total PDRB})}$$

2. Melakukan penelitian atas alokasi belanja pemerintah pusat di daerah dan proporsinya untuk mengetahui seberapa besar alokasi untuk sektor konsumtif dan produktif. Sektor konsumtif merupakan belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai administrasi dan kebutuhan birokrasi, seperti gaji dan tunjangan, honor, belanja operasional kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan sebagainya. Sedangkan sektor produktif antara lain seperti peningkatan mutu jalan, jaringan, irigasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pengadaan traktor untuk masyarakat, dan sebagainya.

3. Melakukan penelitian atas belanja pemerintah pusat di daerah untuk mengetahui:

- a. Belanja Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada sasaran/obyek yang berada di daerah yang bersangkutan.

contoh: belanja yang bersumber dari DIPA yang ditujukan kepada penyedia barang/jasa di daerah yang bersangkutan.

- b. Belanja Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada sasaran/obyek yang berada di luar daerah yang bersangkutan dan berpengaruh terhadap kondisi fiskal regional daerah yang bersangkutan.  
  
contoh: belanja yang bersumber dari DIPA yang ditujukan kepada penyedia barang/jasa yang berasal dari luar daerah yang bersangkutan tetapi melaksanakan kegiatan di daerah yang bersangkutan.
    - c. Belanja Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada sasaran/obyek yang berada di luar daerah yang bersangkutan dan tidak berpengaruh terhadap kondisi fiskal regional daerah yang bersangkutan.  
  
contoh: belanja yang bersumber dari DIPA yang ditujukan kepada penyedia barang/jasa yang berasal dari luar daerah yang selanjutnya digunakan untuk membayar pajak yang menjadi bagian Pemerintah Pusat.
    - d. Pengaruh belanja Pemerintah terhadap jumlah uang beredar di daerah (koordinasi dengan Bank Indonesia di daerah) dan pengaruhnya terhadap belanja di daerah secara keseluruhan.
4. Analisis belanja menurut fungsi dapat dikaitkan dengan sektor riil di daerah tersebut, misalnya dengan analisis komparatif tahun sebelumnya dengan tahun berjalan antara pertumbuhan alokasi/realisasi belanja fungsi kesehatan (dari APBN) terhadap perkembangan di sektor kesehatan (misal pertumbuhan fasilitas kesehatan, tingkat kematian ibu dan bayi, angka kelahiran, angka harapan hidup, tingkat gizi anak-anak dsb); pertumbuhan alokasi/realisasi belanja fungsi pendidikan terhadap perkembangan di sektor pendidikan (misal demografi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat buta aksara, tingkat pendidikan/kualifikasi guru, demografi pekerjaan/profesi, angka partisipasi, dsb).
5. Disamping analisis perbandingan belanja berdasarkan pagu dan realisasi per jenis belanja, per organisasi, per fungsi dan seterusnya, termasuk analisis belanja per kewenangan perlu juga dianalisis belanja yang lebih spesifik seperti:
  - a. Belanja wajib dan belanja tidak wajib  
  
Analisis belanja wajib dapat dikaitkan dengan kecenderungan meningkatnya belanja wajib seiring perkembangan/tuntutan peran pemerintah. Misalnya belanja kesehatan, maka akan secara otomatis meningkat sejalan dengan adanya inovasi di bidang kesehatan. Namun demikian, perlu diperhatikan juga bahwa belanja yang bersifat wajib ini secara otomatis juga langsung membebani alokasi belanja Negara, sehingga sangat berpotensi membatasi ruang fiskal pemerintah. Oleh karena itu, perlu diatur/disesuaikan besarnya atau proporsional dengan kebutuhan belanja pemerintah yang lain.
  - b. Belanja yang tidak produktif  
  
Belanja yang tidak produktif dapat dianalisis dari karakteristik masing-masing jenis belanja misalnya apakah terdapat suatu jenis belanja yang berlebihan?, apakah terdapat belanja modal (atau investasi) yang tidak optimal pencapaiannya? Belanja subsidi yang tidak tepat targetnya.
  - c. Kewajiban kontijensi  
  
Kewajiban kontijensi adalah belanja yang dapat muncul akibat adanya kejadian tertentu, seperti peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Analisis kewajiban kontijensi merupakan salah satu contoh analisis risiko fiskal karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran.
6. Dalam kajian fiskal, analisis belanja selain digunakan untuk mengetahui dampaknya terhadap makroekonomi (konsumsi/pengeluaran pemerintah dan investasi), juga dilakukan untuk mengetahui dampaknya pada tujuan pemerintah, diantaranya

penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan/atau kenaikan kesejahteraan masyarakat.

Dampak yang dirasakan besar terdapat pada alokasi belanja seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dst.

Contoh analisis infrastruktur:

- a. Analisis realisasi proyek-proyek strategis APBN/D di daerah
  - b. Analisis realisasi anggaran pada satker-satker terpilih yang memiliki anggaran belanja modal yang cukup signifikan jumlahnya, termasuk analisis terhadap permasalahan yang dihadapi jika ternyata realisasinya relatif rendah dari yang direncanakan atau tidak mencapai target yang ditetapkan.
7. Analisis infrastruktur tingkat regional untuk mengetahui dampak belanja (APBN) terhadap kesejahteraan masyarakat dikawasan regional tersebut, sekaligus mengukur/menganalisis peran/kontribusi belanja dan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut terhadap total perkembangan pembangunan dan penggunaan anggaran belanjanya secara nasional.
8. Analisis Anggaran Belanja Sektoral.

Indikator yang digunakan pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran mengenai fokus/prioritas bidang pemerintah daerah pada bidang-bidang tertentu. Melalui perbandingan rasio antar wilayah (provinsi/ kabupaten/kota) dapat diketahui perbedaan prioritas bidang diantara wilayah tersebut.

Disamping itu, juga dapat disajikan rasio-rasio yang bertujuan mendapatkan perbandingan (secara indikatif) dampak/sensitifitas dari pertumbuhan belanja pemerintah daerah pada tiap bidang kepada pertumbuhan beberapa indikator sosial-ekonomi terkait.

Pada bagian ini dapat disajikan analisis belanja yang bersumber dari APBD saja, yang mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Disamping itu, juga dapat disajikan analisis terhadap belanja APBD dan APBN di wilayah tersebut (gabungan), namun data yang diperoleh harus disajikan dengan memperhatikan eliminasi transaksi antara data APBN dan APBD. Untuk itu, data konsolidasi yang diperoleh dari GFS regional akan sangat membantu dalam hal ini.

- a. Bidang pelayanan publik dan birokrasi

$$\text{Rasio alokasi belanja pelayanan publik} = \frac{\text{Pagu belanja pelayanan publik APBN+APBD}}{\text{Pagu belanja APBN+APBD}}$$

$$\text{Rasio Jumlah Pegawai} = \frac{\text{Jumlah pegawai fungsional Pemda}}{\text{Jumlah total pegawai Pemda}}$$

- b. Bidang infrastruktur

$$\text{Rasio belanja pemeliharaan jalan} = \frac{\text{Pagu belanja pemeliharaan jalan APBN+APBD}}{\text{Panjang jalan}}$$

$$\text{Rasio pertumbuhan jalan} = \frac{\text{Pertumbuhan belanja peningkatan jalan APBN+APBD}}{\text{Pertumbuhan panjang jalan}}$$

pe

c. Belanja bidang kesehatan

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja kesehatan} &= \frac{\text{Pagu belanja kesehatan}}{\text{APBN+APBD}} \\ &= \frac{\text{Pagu belanja APBN+APBD}}{\text{Pagu belanja APBN+APBD}} \\ \text{Pertumbuhan fasilitas kesehatan} &= \frac{\text{Pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan}}{\text{Pertumbuhan belanja kesehatan}} \\ &= \frac{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}}{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}} \\ \text{Pertumbuhan jumlah tenaga medis} &= \frac{\text{Pertumbuhan jumlah tenaga medis}}{\text{Pertumbuhan belanja kesehatan}} \\ &= \frac{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}}{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}} \\ \text{Pertumbuhan angka kematian bayi} &= \frac{\text{Pertumbuhan angka kematian bayi}}{\text{Pertumbuhan belanja kesehatan}} \\ &= \frac{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}}{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}} \end{aligned}$$

d. Belanja bidang pendidikan

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja pendidikan} &= \frac{\text{Pagu belanja pendidikan}}{\text{APBN+APBD}} \\ &= \frac{\text{Pagu belanja APBN+APBD}}{\text{Pagu belanja APBN+APBD}} \\ \text{Pertumbuhan partisipasi sekolah} &= \frac{\text{Pertumbuhan partisipasi sekolah}}{\text{Pertumbuhan belanja pendidikan}} \\ &= \frac{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}}{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}} \\ \text{Pertumbuhan jumlah guru} &= \frac{\text{Pertumbuhan jumlah guru}}{\text{Pertumbuhan belanja pendidikan}} \\ &= \frac{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}}{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}} \\ \text{Pertumbuhan jumlah sekolah} &= \frac{\text{Pertumbuhan jumlah sekolah}}{\text{Pertumbuhan belanja pendidikan}} \\ &= \frac{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}}{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}} \\ \text{Pertumbuhan jumlah buta huruf} &= \frac{\text{Penurunan jumlah buta huruf}}{\text{Pertumbuhan belanja pendidikan}} \\ &= \frac{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}}{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}} \end{aligned}$$

e. Belanja bidang kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja kesejahteraan} &= \frac{\text{Pagu belanja kesejahteraan APBN+APBD}}{\text{Pagu belanja APBN+APBD}} \\ \text{Pertumbuhan HDI} &= \frac{\text{Pertumbuhan HDI}}{\text{Pertumbuhan belanja kesejahteraan}} \\ &= \frac{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}}{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}} \\ \text{Pertumbuhan penduduk miskin} &= \frac{\text{Pertumbuhan penduduk miskin}}{\text{Pertumbuhan belanja kesejahteraan}} \\ &= \frac{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}}{\text{Pertumbuhan APBN+APBD}} \end{aligned}$$

$$\text{Pertumbuhan angka kelahiran} = \frac{\text{Pertumbuhan angka kelahiran}}{\text{Pertumbuhan belanja Keluarga Berencana APBN+APBD}}$$

f. Bidang pertanian

$$\text{Rasio belanja pertanian} = \frac{\text{Pagu belanja pertanian}}{\text{APBN+APBD}} \div \text{Pagu belanja APBN+APBD}$$

$$\text{Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP)} = \frac{\text{Pertumbuhan NTP}}{\text{Pagu belanja pertanian APBN+APBD}}$$

$$\text{Pertumbuhan produksi pertanian} = \frac{\text{Pertumbuhan produksi}}{\text{Pagu belanja pertanian APBN+APBD}}$$

$$\text{Rasio subsidi pertanian} = \frac{\text{Pertumbuhan produksi pertanian}}{\text{Pertumbuhan belanja subsidi benih dan/atau pupuk APBN+APBD}}$$

9. Perbandingan dengan sektor ekonomi unggulan, indikator ini cenderung berfungsi sebagai perbandingan secara indikatif antara fokus anggaran pemerintah dengan kontribusi sektor-sektor ekonomi unggulan kepada pertumbuhan. Contoh formulanya adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Rasio belanja sektoral} \\ \text{terhadap kontribusi sektor} \\ \text{kepada PDRB} \end{array} = \frac{(\text{Belanja Sektor XXX} / \text{Total Belanja APBN} + \text{APBD})}{(\text{Kontribusi Sektor XXX} / \text{Total PDRB})}$$

10. Saat melakukan analisis belanja, dapat dikaitkan dengan konteks demografis

- Contoh: struktur umur penduduk (penduduk yang didominasi orang muda atau tua) dapat mempengaruhi pengeluaran misalnya lebih diarahkan pada belanja kesehatan untuk penduduk tua, atau belanja pendidikan dan program ketenagakerjaan pada saat kondisi demografis adalah lebih pada penduduk muda.
- Contoh lain adalah struktur umur penduduk dapat membantu menganalisis penurunan pendapatan, karena tingkat produktivitas yang menurun jika banyak penduduk tua.

11. Analisis kebijakan alokasi anggaran

Kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah yang ditunjukkan dalam alokasi anggaran (alokasi APBN di wilayah tersebut dan alokasi APBD). Dalam hal ini, analisis dilakukan untuk mengetahui komposisi alokasi anggaran pada wilayah tersebut yang diindikasikan berpengaruh kepada kemampuan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian regional. Analisis dilakukan dengan memperbandingkan alokasi anggaran pada klasifikasi tertentu dengan alokasi anggaran lainnya ataupun dengan total alokasi anggaran. Hal ini untuk mengetahui tingkat sensitifitas kebijakan fiskal yang dilaksanakan. Misalnya dengan membandingkan alokasi belanja pegawai dengan alokasi total, untuk mengetahui berapa proporsi dari total alokasi yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan alokasi atau proporsi tersebut antar wilayah (analisis spasial), sehingga dapat diketahui indikasi perbedaan kebijakan fiskal antar wilayah. Perbandingan tersebut dapat dilakukan antar kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut, dibandingkan dengan provinsi lain (secara

*pl*

nasional atau provinsi dalam satu pulau besar), ataupun dibandingkan dengan tingkat nasional. Kemudian analisis juga dapat dilakukan dengan memperbandingkan antar waktu (*time series*), misalnya dengan memperbandingkan alokasi atau proporsi alokasi tersebut dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya (misalnya antara semester I tahun ini dengan semester I tahun sebelumnya). Hal ini untuk mengetahui perkembangan kebijakan tersebut dari waktu ke waktu.

## 12. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam alokasi anggaran dimaksudkan untuk mempengaruhi perekonomian, yaitu dalam hal ini untuk mempengaruhi permintaan agregat dan redistribusi pertumbuhan. Untuk itu, dalam *magnitude* tertentu, sepatutnya kebijakan fiskal memberi dampak kepada perekonomian regional. Demikian pula halnya kebijakan fiskal seharusnya memiliki arah dan fokus yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diharapkan. Singkatnya, harus ada keterkaitan atau dampak antara anggaran pemerintah dengan kondisi perekonomian regional yang ditunjukkan oleh indikator-indikator ekonomi makro (regional) seperti PDRB, indikator demografis, indikator kesejahteraan maupun indikator sektoral.

Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan atau rasio yang secara indikatif dapat mengukur hubungan/keterkaitan dan dampak dari kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional. Rasio-rasio yang digunakan tersebut kemudian dapat diperbandingkan kembali antar wilayah dan antar waktu untuk memberi nilai tambah atas informasi mengenai rasio-rasio tersebut.

## D. TRANSFER KE DAERAH

Dana Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

### Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer

Belanja Dana Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dapat dibedakan menjadi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer  
di Propinsi xxx (dalam miliar rupiah)

Dana Transfer	Pagu Tahun XXXX-1	Realisasi Tahun XXXX-1	Pagu Tahun XXXX	Realisasi Tahun XXXX
DAU				
DAK				
DBH				
Dana Penyesuaian				

Sumber: Data LKPP UAPPAW, DPJK atau sumber lain yang relevan

Tujuan analisis Dana Transfer ke Daerah adalah untuk mengetahui kontribusi belanja negara terhadap komponen pendapatan daerah dalam APBD.

Contoh analisis Dana Transfer ke Daerah:

### 1. Analisis ruang fiskal dan kemandirian daerah

- Ruang fiskal, pendapatan dikurangi dana alokasi *earmarked* (DAK) dan belanja wajib (belanja pegawai dan belanja barang yang mengikat). Mencerminkan ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemda tanpa mengganggu solvabilitas fiskal (membiayai belanja wajib).



$$\text{Ruang Fiskal} = (\text{Total Pendapatan-DAK}) - \text{Belanja Pegawai tak langsung}$$

- b. Rasio kemandirian daerah, Rasio PAD terhadap total pendapatan dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Apabila rasio PAD lebih besar daripada rasio dana transfer berarti semakin mandiri dan sebaliknya semakin besar rasio dana transfer berarti tingkat ketergantungan tinggi.

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan APBD}} \quad \text{Rasio Dana Transfer} = \frac{\text{Total Dana Transfer}}{\text{Total Pendapatan APBD}}$$

2. Analisis komparatif/perbandingan *year on year* (yoy) antara *trend* alokasi dana transfer untuk daerah tersebut terhadap: Pertumbuhan ekonomi regional, PDRB, Tingkat pengangguran, Tingkat kemiskinan, IPM (HDI), dan Indikator fiskal lainnya pada daerah tersebut.
3. Analisis pengaruh alokasi dana transfer ke daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional, PDRB, Tingkat pengangguran, Tingkat kemiskinan, IPM (HDI), dan Indikator fiskal lainnya, apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Apabila tidak ada pengaruh (meningkat/menurunnya kecil sekali), analisis penyebabnya apakah karena aspek alokasi atau aspek operasionalnya atau aspek lain.
4. Analisis persentase Dana Transfer ke Daerah yang dibelanjakan di luar daerah penerima dana transfer tersebut (misalnya: suatu proyek besar yang pemenang tendernya adalah dari luar daerah tersebut atau belanja untuk pengadaan barang dan jasa yang terpaksa dilakukan di luar daerah tersebut). Selanjutnya perlu dianalisis dampak/pengaruh belanja transfer tersebut bagi kegiatan perekonomian dikawasan tersebut dan/atau kawasan sekitarnya yang terkait dengan belanja transfer dimaksud.

#### E. PENGELOLAAN BLU PUSAT

Definisi Badan Layanan Umum adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

##### 1. Profil dan jenis layanan satker BLU pusat

Dalam bagian ini, dapat diberikan gambaran terkait profil dan jenis layanan BLU Pusat yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya dapat dijabarkan jumlah BLU Pusat di Propinsi terkait dan pembagian/ pengelompokannya berdasarkan sektor atau bidang usahanya.

Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat di Provinsi xxx

No	Jenis Layanan	Satker BLU	Nilai Aset	Pagu PNBP	Pagu RM	Jumlah Pagu

Sumber: Data Kanwil, Dit BLU atau sumber lain yang relevan

## 2. Perkembangan pengelolaan aset, PNPB dan RM BLU pusat

Dalam hal ini, perlu dijelaskan perkembangan atau kemajuan BLU Pusat selama minimal dua tahun terakhir. Hal tersebut dapat diukur dari jumlah dan persentase peningkatan aset serta peningkatan persentase pagu PNPB terhadap persentase total pagu dalam jangka waktu beberapa tahun tersebut.

### Perkembangan Pengelolaan Aset satker BLU di Propinsi xxx (dalam miliar rupiah)

No	Nama Satker BLU	Aset Tahun XXXX-1	Aset Tahun XXXX
1.			
2.			
3.			
dst			

Sumber: Data Kanwil, Dit BLU atau sumber lain yang relevan

### Perkembangan Pagu PNPB dan Pagu RM satker BLU di Propinsi xxx (dalam miliar rupiah)

No.	Nama Satker BLU	Tahun XXXX-1		Tahun XXXX	
		Pagu RM	Pagu Rupiah	Pagu RM	Pagu Rupiah
1.					
2.					
3.					
dst					

Sumber: Data Kanwil, Dit BLU atau sumber lain yang relevan

## 3. Kemandirian BLU

Salah tujuan diberikannya status BLU kepada satuan kerja adalah untuk mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*). Oleh karena itu satker BLU didorong untuk menciptakan kemandirian terhadap dirinya sendiri. Kemandirian tersebut dapat dilihat dari berkurangnya porsi alokasi pagu rupiah murni (RM). Di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan ..... terdapat .....BLU yang telah memiliki porsi pagu PNPB diatas 65% dari total pagunya.

### Tingkat Kemandirian BLU Pusat di Propinsi xxx

No	Jenis Layanan	Satker BLU	Nilai Aset	Tahun XXXX-1				Tahun XXXX			
				Pagu PNPB	%	Pagu RM	%	Pagu PNPB	%	Pagu RM	%
1.											
2.											
3.											
dst											

Sumber: Data Kanwil, Dit BLU atau sumber lain yang relevan

## 4. Profil dan jenis layanan satker PNPB

Terdapat .... satuan kerja yang mengelola dana PNPB akan tetapi belum menjadi satker BLU.

**Profil dan Jenis Layanan Satker Pengelola PNBPN di Propinsi xxx**

No	Jenis Layanan	Satker PNBPN	Nilai Aset	Pagu PNBPN	Pagu RM	Jumlah Pagu
1.						
2.						
3.						
dst						

Sumber: Data Kanwil, Dit BLU atau sumber lain yang relevan

**5. Potensi satker PNBPN menjadi satker BLU**

Dari sekian satker pengelola PNBPN terdapat ... satker yang berpotensi untuk menjadi satker BLU. Satker .... mengalami peningkatan aset sebesar ...% atau dari Rp... menjadi Rp.....Selain itu terdapat peningkatan persentase pagu PNBPN sebesar ....% dari total pagu. Satker ... juga mengalami peningkatan aset sebesar ...% atau dari Rp... menjadi Rp.....Dari sisi pagu terdapat peningkatan persentase pagu PNBPN sebesar ....% dari total pagu.

**Perkembangan Pengelolaan Aset Satker PNBPN di Propinsi xxx**

No	Nama Satker PNBPN	Aset Tahun XXXX-1	Aset Tahun XXXX
1.			
dst			

Sumber: Data Kanwil, Dit BLU atau sumber lain yang relevan

**Perkembangan Pagu PNBPN dan Pagu RM Satker PNBPN di Propinsi xxx**

No.	Nama Satker BLU	Tahun XXXX-1		Tahun XXXX	
		Pagu RM	Pagu Rupiah	Pagu RM	Pagu Rupiah
1.					
2.					
3.					
dst					

Sumber: Data Kanwil, Dit BLU atau sumber lain yang relevan

Contoh analisis terkait pengelolaan BLU Pusat:

**1. Analisis pagu dan realisasi belanja BLU**

Setiap tahun Satker BLU menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang selanjutnya diintegrasikan dengan RKA-K/L Satuan Kerja BLU tersebut. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima. Dengan demikian dalam menetapkan pagu belanja (kebutuhan belanja), Satker BLU sudah memperhitungkan kemampuan pendapatan yang akan diterimanya. Selanjutnya dalam rangka memberikan fleksibilitas pengelolaan belanja, Satker BLU dapat diberikan ambang batas belanja yaitu melakukan belanja diatas pagu sebesar persentase ambang batas tersebut. Atas realisasi pendapatan yang lebih besar dari realisasi belanja BLU akan menjadi surplus. Sebaliknya apabila pendapatan pada tahun berjalan tidak dapat untuk menutupi kebutuhan belanja, Satker BLU dapat menggunakan saldo kas BLU, yang dalam hal ini terjadi defisit.

Tujuan atas analisis pagu dan realisasi belanja BLU adalah:

- mengetahui perkembangan pagu dan realisasi belanja Satker BLU untuk beberapa tahun.
- mengetahui penggunaan ambang batas belanja BLU.
- mengetahui penggunaan saldo kas BLU untuk menutup kebutuhan belanja BLU.

Contoh analisis pagu dan realisasi belanja BLU adalah:

- a. analisis trend atas pendapatan dan belanja BLU. Analisis ini dengan membandingkan pendapatan dan belanja BLU selama beberapa tahun sehingga akan terlihat trend kenaikan atau penurunan atas pendapatan dan belanja BLU
- b. analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya surplus atau defisit. Analisis ini dapat dilakukan dengan meneliti lebih dalam jenis-jenis pendapatan atau belanja yang berkontribusi atas terjadinya surplus atau defisit tersebut.

## 2. Analisis Kemandirian BLU

Meskipun tujuan BLU pembentukan BLU adalah tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun diharapkan dengan pelayanan yang meningkat maka secara langsung juga pendapatannya meningkat. Lebih jauh lagi diharapkan persentase alokasi belanja Satker BLU yang bersumber dari Rupiah Murni semakin menurun digantikan dengan sumber belanja dari pendapatan BLU.

Tujuan dari analisis kemandirian BLU adalah mengetahui tingkat kemandirian BLU untuk dapat membiayai kebutuhan belanja dari sumber pendapatan BLU. Contoh analisis kemandirian BLU adalah analisis rasio antara sumber dana BLU yang berasal dari PNPB dengan Rupiah Murni. Semakin naiknya rasio sumber dana yang berasal dari PNPB dapat disimpulkan tingkat kemandirian BLU semakin meningkat. Analisis lain yang dapat digunakan adalah membandingkan pendapatan BLU dengan biaya operasional (seluruh belanja BLU selain belanja modal). Analisis ini dapat menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan PNPB}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- a. Pendapatan PNPB merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.
- b. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNPB BLU, tidak termasuk biaya penyusutan.

Hasil perhitungan tersebut dapat dikelompokkan dengan skor rasio adalah sebagai berikut:

Rasio PNPB terhadap Biaya Operasional (%) (PB)	Skor
PB > 65	2,5
57 < PB ≤ 65	2,25
50 < PB ≤ 57	2
42 < PB ≤ 50	1,75
35 < PB ≤ 42	1,5
28 < PB ≤ 35	1,25
20 < PB ≤ 28	1
12 < PB ≤ 20	0,75
4 < PB ≤ 12	0,5
0 ≤ PB ≤ 4	0

Selanjutnya dapat dilakukan klasifikasi berdasarkan skor tersebut tingkat kemandirian Satker BLU.

### 3. Analisis Perkembangan Aset BLU

Pendapatan yang diperoleh BLU diharapkan tidak hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Satker BLU tersebut. Dalam rangka meningkatkan layanannya baik dari sisi mutu maupun volume layanan, dibutuhkan penambahan aset terutama aset yang secara langsung menunjang layanan. Disamping itu aset BLU yang sudah habis umur ekonomisnya perlu dilakukan penggantian. Tujuan analisis perkembangan aset BLU untuk mengetahui penambahan atau penurunan aset BLU untuk dapat menjaga kontinuitas layanan Satker BLU.

Analisis perkembangan aset BLU dapat dilakukan berupa analisis trend nilai aset BLU selama beberapa tahun, khususnya aset yang secara langsung menunjang layanan. Dalam melakukan analisis tersebut, perlu dipisahkan antara aset yang diperoleh dari pendapatan BLU dengan yang diperoleh dari Rupiah Murni. Nilai aset tersebut juga dapat dianalisis berdasarkan nilai perolehan dan nilai bukunya. Perlu juga dianalisis karakteristik aset tersebut. Misalnya nilai aset tanah akan naik setiap tahun seiring dengan naiknya nilai tanah pada lokasi satker BLU tersebut berada.

### 4. Analisis Efektivitas BLU

Analisis efektivitas BLU adalah analisis untuk mengetahui efektivitas dibentuknya BLU yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Peningkatan pelayanan antara lain dapat terlihat dari pendapatan yang dihasilkan dari layanan BLU. Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui kemampuan BLU untuk menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya.

Contoh analisis yang digunakan untuk mengukur efektivitas BLU adalah mengukur Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turn Over) adalah dengan membandingkan PNPB dan aset BLU, dengan rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Pendapatan operasional merupakan PNPB BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN dan hibah.
- Aset tetap dihitung berdasarkan nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

Hasil perhitungan tersebut dapat dikelompokkan dengan skor rasio adalah sebagai berikut:

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
PAT > 20	2
15 < PAT ≤ 20	1,5
10 < PAT ≤ 15	1
5 < PAT ≤ 10	0,5
0 < PAT ≤ 5	0,25
PAT = 0	0

Selanjutnya dapat dilakukan klasifikasi berdasarkan skor tersebut tingkat kemandirian Satker BLU. Namun demikian, dalam melakukan analisis ini perlu mempertimbangkan faktor lainnya. Misalnya, Satker BLU Rumah Sakit Kusta atau Rumah Sakit Jiwa umumnya memiliki aset berupa tanah yang luas untuk memberikan kenyamanan dan dalam rangka rehabilitasi pasien. Aset tanah tersebut tidak secara langsung berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan.

#### 5. Analisis Legal BLU

Pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Satker BLU adalah tetap dalam koridor penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Satker BLU tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tujuan analisis legal BLU adalah untuk menilai tingkat kepatuhan BLU terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU. Analisis legal BLU dapat dilaksanakan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif;
- b. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;
- c. Penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU;
- d. Persetujuan Tarif Layanan oleh Menteri Keuangan;
- e. Penetapan Sistem Akuntansi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
- f. Persetujuan Pembukaan Rekening;
- g. Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Pengelolaan Keuangan BLU;

Selanjutnya dapat dilakukan pengelompokkan satker BLU dengan tingkat pemenuhan kewajiban baik, sedang, dan tidak baik. Dapat dilakukan analisis terkait perkembangan/perubahan pelayanan yang dilakukan oleh Satker BLU (dibandingkan dengan sebelum berstatus BLU), dan perannya terhadap mendukung fungsi pelayanan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan perekonomian regional.

### F. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT

Selain pengelolaan Badan Layanan Umum, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi... juga menatausahakan investasi pemerintah khususnya penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*), kredit program, dan investasi lainnya.

#### 1. Penerusan pinjaman

Salah satu investasi yang ditatausahakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi... adalah penerusan pinjaman pemerintah pusat (*Subsidiary Loan Agreement*) kepada pemerintah daerah/BUMD. Terdapat sekitar Rp..... penerusan pinjaman yang ditatausahakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi.....

Profil Penerusan Pinjaman Provinsi xxx

No.	Nomor SLA	Nama SLA	Penerima SLA	Jumlah SLA	Tingkat Bunga

Sumber: Data Kanwil, Data Pemda/BUMN/BUMD Penerima SLA, Dit SMI atau sumber lain yang relevan

**Perkembangan Pembayaran Angsuran Pokok SLA di Propinsi xxx**  
(dalam jutaan rupiah)

Penerimaan PNPB	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun XXXX-1	Tahun XXXX
SLA A														
SLA B														
SLA C														

Sumber: Data Kanwil, Data Pemda/BUMN/BUMD Penerima SLA, Dit SMI atau sumber lain yang relevan

**Perkembangan Pembayaran Denda SLA di Propinsi xxx**  
(dalam jutaan rupiah)

Penerimaan PNPB	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun XXXX-1	Tahun XXXX
SLA A														
SLA B														
SLA C														

Sumber: Data Kanwil, Data Pemda/BUMN/BUMD Penerima SLA, Dit SMI atau sumber lain yang relevan

**2. Kredit program**

Selain SLA, juga terdapat skema subsidi kredit program. Terdapat ....jenis kredit program antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Subsidi Resi Gudang (SRG), Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD-Nias) Korban Bencana Alam Gempa dan Tsunami.

**Profil Kredit Program Provinsi xxx**

No	Nomor Kredit Program	Jenis Kredit Program	Penerima Kredit Program	Jumlah Kredit Program	Tingkat Bunga	Subsidi Bunga

Sumber: Data Kanwil, Data Perbankan atau sumber lain yang relevan

**Perkembangan Pembayaran Angsuran Pokok Kredit Program di Propinsi xxx**  
(dalam jutaan rupiah)

Penerimaan PNPB	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun XXXX-1	Tahun XXXX
Kredit Program A														
Kredit Program B														
Kredit Program C														

Sumber: Data Kanwil, Data Pemda/BUMN/BUMD Penerima SLA, Dit SMI atau sumber lain yang relevan

**Perkembangan Pembayaran Bunga Kredit Program di Propinsi xxx**  
(dalam jutaan rupiah)

Penerimaan PNPB	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun XXXX-1	Tahun XXXX
Kredit Program A														
Kredit Program B														
Kredit Program C														

Sumber: Data Kanwil, Data Pemda/BUMN/BUMD Penerima SLA, Dit SMI atau sumber lain yang relevan

Contoh analisis terkait Manajemen Investasi:

1. Analisis Penerusan Pinjaman yang ditatasahkan oleh Pemda

Pinjaman Pemerintah Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas. Sesuai PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, bahwa dalam melakukan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut::

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah (paling sedikit 2,5); dan
- c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.

Sedangkan kewajiban pembayaran kembali dapat dilakukan dengan mengetahui jenis pinjamannya yaitu:

- a. Pinjaman Jangka Pendek Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.



- b. Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Menengah yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan.
- c. Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui penatausahaan Pinjaman Daerah atas:

- a. penerimaan dan penggunaan Pinjaman Daerah; dan
- b. kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah.

Analisis penerimaan dan penggunaan pinjaman daerah dengan meneliti penggunaan pinjaman tersebut apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Pinjaman daerah yang diperkenankan untuk pembangunan prasarana air bersih, persampahan, Terminal Angkutan Darat serta Terminal Angkutan Sungai dan Danau, Pasar, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan analisis kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah dilakukan dengan membagi jenis pinjaman dan status pinjaman tersebut apakah lancar atau macet. Selanjutnya apabila terdapat pinjaman belum lunas dilakukan analisis penyebabnya dan tindak lanjut yang telah dilakukan baik pemberi pinjaman maupun pemerintah daerah.

## 2. Analisis Perkembangan Pembayaran Angsuran Pokok *Subsidiary Loan Agreement* (Perjanjian Penerusan Pinjaman)

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi atas pinjaman daerah meliputi:

- a. Biaya Komitmen adalah biaya yang dikenakan atas plafond yang belum ditarik. Biaya komitmen dikenakan terhitung sejak tanggal efektif perjanjian.
- b. Biaya Administrasi dihitung dari outstanding pinjaman per jatuh tempo
- c. Cicilan pokok pinjaman yang dihitung dari total penarikan (jumlah piutang) ditambah dengan kapitalisasi dibagi dengan jumlah periode pengembalian (pro rata)
- d. Denda Pokok adalah biaya yang dibebankan kepada debitur atas keterlambatan pembayaran pokok.
- e. Denda Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada debitur atas keterlambatan pembayaran biaya administrasi.
- f. Denda Biaya Komitmen adalah biaya yang dibebankan kepada debitur atas keterlambatan pembayaran biaya komitmen.

Tujuan analisis perkembangan pembayaran angsuran pokok SLA adalah mengetahui:

- a. besarnya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayar pada saat tanggal jatuh tempo;
- b. outstanding pinjaman;
- c. informasi lainnya terkait percepatan pembayaran, pelunasan pinjaman, perhitungan kewajiban per *cut off date* dalam rangka restrukturisasi pinjaman.

Analisis perkembangan pembayaran ini dapat dilakukan dengan meneliti ketepatan pembayaran angsuran pinjaman oleh pemerintah daerah. Dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran tindak lanjut penyelesaian anggurannya dan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok tersebut.

## 3. Analisis Denda *Subsidiary Loan Agreement* (Perjanjian Penerusan Pinjaman)

Analisis denda SLA dilakukan untuk mengetahui denda yang harus dibayar atas pinjaman pemerintah daerah berupa besaran denda yang harus dibayar, waktu pembayaran denda, dan penyebab terjadinya denda tersebut. Denda SLA tersebut bisa terdiri dari denda pokok, denda administrasi dan/atau denda biaya komitmen. Analisis denda dapat dilakukan dengan membandingkan waktu pembayaran pokok dengan waktu pembayaran denda SLA. Apabila timbulnya denda tersebut tidak segera diikuti dengan pelaksanaan pembayaran

denda SLA tersebut bisa berimplikasi kepada penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran berikutnya dan pelunasan pinjaman. Analisis selanjutnya dapat berupa penyelesaian atas SLA tersebut apabila menunggak angsuran dalam waktu yang cukup lama, misalnya pelaksanaan restrukturisasi pinjaman, pemotongan pinjaman, atau penghapusan pinjaman.

#### 4. Analisis Kredit Program

Kredit Program yang dimaksud disini adalah kredit program bersubsidi bunga yang pendanaannya berasal dari Bank Pelaksana dan disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan tingkat bunga pasar, namun sebagian menjadi beban Pemerintah dalam bentuk subsidi bunga.

Tujuan analisis kredit program adalah:

- a. Mengetahui dan menilai kepatuhan penyaluran kredit program
- b. Inventarisasi permasalahan dalam penyaluran dan pelaksanaan kredit program
- c. Memberikan masukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kredit Program sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempercepat penyaluran Kredit Program

Analisis kredit program dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. analisis besaran subsidi bunga atas masing-masing jenis kredit program yang dapat dirinci per Bank Pelaksana/kantor cabang dan per debitur. Selanjutnya dapat dilakukan analisis mendalam atas jenis kredit program yang menonjol dan dampak kredit program tersebut secara umum dalam meningkatkan pertumbuhan usaha sektor terkait.
- b. Analisis ketepatan waktu penyaluran subsidi bunga kredit program dan jatuh tempo pembayarannya. Selanjutnya dapat dilakukan analisis mendalam dalam hal terjadi keterlambatan waktu penyalurannya.
- c. Analisis potensi risiko dan hambatan secara umum terkait dengan pelaksanaan manajemen investasi dan penerusan pinjaman (misalnya potensi gagal bayar dan/atau keterlambatan pembayaran pokok, bunga ataupun denda), serta pihak mana yang paling sering mengalami kendala/hambatan tersebut.

## BAB IV

### PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Bagian ini menjelaskan perkembangan APBD Tingkat Provinsi, Pengelolaan BLU Daerah, Pengelolaan Investasi Daerah, SILPA dan Pembiayaan, dan contoh analisisnya

#### A. APBD TINGKAT PROVINSI

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Informasi yang ditampilkan dapat berupa data APBD agregat seluruh Pemda (Provinsi/kabupaten/kota), dan/atau ditampilkan data APBD seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) sepanjang tersedia. Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (*I-Account*), dapat diketahui arah kebijakan fiskal yang diterapkan.

Profil APBD Provinsi xxx  
Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (dalam miliar rupiah)

PAD		
Dana Perimbangan		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
Belanja Tidak Langsung		
Belanja Langsung		
Penerimaan Pembiayaan		
Pengeluaran Pembiayaan		

Sumber: Pemda atau sumber lain yang relevan

#### B. JENIS PENDAPATAN DALAM APBD

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebagaimana tersebut pada tabel diatas, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Jenis Pendapatan APBD di Provinsi xxx  
(dalam miliar rupiah)

Pendapatan	Target Semester... Tahun XXXX-1	Realisasi Semester... Tahun XXXX-1	Target Semester... Tahun XXXX	Realisasi Semester... Tahun XXXX
<b>PAD</b>				
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
<b>DANA PERIMBANGAN</b>				
DBH				
DAU				
DAK				
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
Hibah				
Dana Darurat				
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya				
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya				
Lain-lain				

Pendapatan daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintahan daerah adalah dari PAD, karena hal ini berarti pemerintah daerah didorong untuk dapat meningkatkan kemandirian keuangannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan analisis Pendapatan Asli Daerah adalah untuk mengetahui kemandirian daerah dalam rangka membiayai belanja daerah.

Contoh analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah, diantaranya meliputi:

1. Analisis komposisi pendapatan daerah dan perbandingannya, misalnya perbandingan PAD dan dana transfer.
2. Analisis perbandingan komponen pendapatan daerah dengan PDRB.
3. Analisis perbandingan PAD dengan belanja daerah.
4. Analisis komposisi pendapatan daerah, dan analisis perbandingan PAD dan belanja daerah digunakan untuk menganalisis tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari Pusat, dan sejauh mana pemda dapat membiayai belanjanya secara mandiri.

5. Analisis mobilisasi PAD yang dilakukan di daerah/upaya intensifikasi PAD yang telah atau akan dilakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
6. Analisis mengenai pendapatan yang dianggap signifikan di wilayah setempat. Misalnya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang dapat dianalisis apakah sebagian besar bersumber dari kendaraan yang dimiliki masyarakat umum atau dari kendaraan dinas Pemerintah atau dari kendaraan komersial.
7. Analisis besarnya pendapatan di APBD yang bersumber dari DAU dan DBH untuk kemudian dibandingkan dengan besarnya SiLPA daerah yang dibandingkan dari tahun ke tahun. Data dimaksud dapat dianalisis lebih jauh dengan data pihak lain seperti Bank Indonesia untuk melihat apakah SiLPA daerah tersebut dipergunakan untuk investasi seperti apa, apakah digunakan untuk membeli SPN atau investasi lain yang cenderung berisiko. Dapat pula dianalisis mengenai kemungkinan SiLPA tersebut dipergunakan sebagai sumber pembiayaan di APBD misalnya untuk pembelian Obligasi Negara.

### C. JENIS BELANJA DALAM APBD

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Dana Transfer dari Pusat ke Daerah (DAU, DAK, Dana Penyeimbang, Dana Kontingensi, DBH, dll). Tujuan analisis Belanja Daerah antara lain adalah untuk mengetahui kontribusi pengeluaran daerah terhadap pengeluaran pemerintah secara nasional. Analisis Belanja Daerah dapat dilakukan berdasarkan klasifikasi belanja daerah seperti klasifikasi urusan, klasifikasi fungsi dan sebagainya.

#### 1. Rincian Belanja Daerah Berdasarkan klasifikasi urusan

APBD dapat diklasifikasikan menjadi 35 urusan daerah antara lain: transmigrasi, perindustrian, perdagangan, pariwisata, ESDM, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dsb

Profil APBD  
Berdasarkan Klasifikasi Urusan di Propinsi xxx (dalam miliar rupiah)

No.	APBD Berdasarkan Urusan	TA 20XX	TA 20XX+1
<b>1.</b>	<b>Urusan Wajib</b>		
	Pendidikan		
	Kesehatan		
	Pekerjaan Umum		
	dst		
<b>2.</b>	<b>Urusan Pilihan</b>		
	Pertanian		
	Kehutanan		
	dst		

Sumber: Pemda atau sumber lain yang relevan

#### 2. Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi)

*pl*

Profil APBD  
Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja di Propinsi xxx (dalam miliar rupiah)

No.	APBD Berdasarkan Urusan	TA 20XX	TA 20XX+1
<b>1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		
	Belanja Pegawai		
	Belanja Bunga		
	Belanja Subsidi		
	Belanja Hibah		
	Belanja Bantuan Sosial		
	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes		
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes		
	Belanja Tidak Terduga		
<b>2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>		
	Belanja Pegawai		
	Belanja Barang		
	Belanja Modal		

Sumber: Pemda atau sumber lain yang relevan

Contoh Analisis Belanja Daerah:

- Melakukan penelitian atas alokasi belanja daerah dan proporsinya untuk mengetahui seberapa besar alokasi untuk sektor konsumtif dan produktif.
- Analisis belanja menurut fungsi dapat dikaitkan dengan sektor riil di daerah tersebut, misalnya dengan analisis komparatif per tahun antara pertumbuhan alokasi/realisasi belanja fungsi kesehatan (dari APBD) terhadap perkembangan di sektor kesehatan (misal pertumbuhan fasilitas kesehatan, tingkat kematian ibu dan bayi, angka kelahiran, angka harapan hidup, tingkat gizi anak-anak dsb); pertumbuhan alokasi/realisasi belanja fungsi pendidikan terhadap perkembangan di sektor pendidikan (misal demografi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat buta aksara, tingkat pendidikan/kualifikasi guru, demografi pekerjaan/profesi, angka partisipasi, dsb).
- Dalam kajian fiskal, analisis belanja selain digunakan untuk mengetahui dampaknya terhadap makroekonomi (konsumsi/pengeluaran pemerintah dan investasi), juga dilakukan untuk mengetahui dampaknya pada tujuan pemerintah, diantaranya penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan/atau kenaikan kesejahteraan masyarakat.
  - Dampak yang dirasakan besar terdapat pada alokasi belanja seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dst.
  - Contoh analisis infrastruktur:
    - Analisis realisasi proyek-proyek strategis APBD di daerah
    - Analisis realisasi anggaran pada satker-satker terpilih yang memiliki anggaran belanja modal yang cukup signifikan jumlahnya, termasuk analisis terhadap permasalahan yang dihadapi jika ternyata realisasinya relatif rendah dari yang direncanakan atau tidak mencapai target yang ditetapkan.

Analisis infrastruktur tingkat regional untuk mengetahui dampak belanja (APBD) terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan regional tersebut, sekaligus mengukur/menganalisis peran/kontribusi belanja dan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut terhadap total perkembangan pembangunan dan penggunaan anggaran belanjanya secara nasional.

#### 4. Analisis kebijakan alokasi anggaran

Kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah yang ditunjukkan dalam alokasi anggaran (alokasi APBN di wilayah tersebut dan alokasi APBD). Dalam hal ini, analisis dilakukan untuk mengetahui komposisi alokasi anggaran pada wilayah tersebut yang diindikasikan berpengaruh kepada kemampuan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian regional. Analisis dilakukan dengan membandingkan alokasi anggaran pada klasifikasi tertentu dengan alokasi anggaran lainnya ataupun dengan total alokasi anggaran. Hal ini untuk mengetahui tingkat sensitifitas kebijakan fiskal yang dilaksanakan. Misalnya dengan membandingkan alokasi belanja pegawai dengan alokasi total, untuk mengetahui berapa proporsi dari total alokasi yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan alokasi atau proporsi tersebut antar wilayah (analisis spasial), sehingga dapat diketahui indikasi perbedaan kebijakan fiskal antar wilayah. Perbandingan tersebut dapat dilakukan antar kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut, dibandingkan dengan provinsi lain (secara nasional atau provinsi dalam satu pulau besar), ataupun dibandingkan dengan tingkat nasional. Kemudian analisis juga dapat dilakukan dengan membandingkan antar waktu (*time series*), misalnya dengan membandingkan alokasi atau proporsi alokasi tersebut dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya (misalnya antara semester I tahun ini dengan semester I tahun sebelumnya). Hal ini untuk mengetahui perkembangan kebijakan tersebut dari waktu ke waktu.

#### 5. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam alokasi anggaran dimaksudkan untuk mempengaruhi perekonomian, yaitu dalam hal ini untuk mempengaruhi permintaan agregat dan redistribusi pertumbuhan. Untuk itu, dalam *magnitude* tertentu, sepatutnya kebijakan fiskal memberi dampak kepada perekonomian regional. Demikian pula halnya kebijakan fiskal seharusnya memiliki arah dan fokus yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diharapkan. Singkatnya, harus ada keterkaitan atau dampak antara anggaran pemerintah dengan kondisi perekonomian regional yang ditunjukkan oleh indikator-indikator ekonomi makro (regional) seperti PDRB, indikator demografis, indikator kesejahteraan maupun indikator sektoral.

Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan atau rasio yang secara indikatif dapat mengukur hubungan/keterkaitan dan dampak dari kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional. Rasio-rasio yang digunakan tersebut kemudian dapat diperbandingkan kembali antar wilayah dan antar waktu untuk memberi nilai tambah atas informasi mengenai rasio-rasio tersebut.

### D. PENGELOLAAN BLU DAERAH

#### 1. Profil dan jenis layanan satker BLU daerah

Dalam bagian ini, dapat diberikan gambaran terkait profil dan jenis layanan BLUD yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya dapat dijabarkan jumlah BLUD di Propinsi terkait dan pembagian/ pengelompokannya berdasarkan sektor atau bidang usahanya.

Profil dan Jenis Layanan BLU Daerah di Propinsi xxx

No	Jenis Layanan	Satker BLUD	Nilai Aset	Pagu PNB	Pagu RM	Jumlah Pagu

Sumber: Data Pemda, BLUD atau sumber lain yang relevan

## 2. Perkembangan pengelolaan aset, PNPB dan RM BLU Daerah

Dalam hal ini, perlu dijelaskan perkembangan atau kemajuan BLUD per sektor selama minimal dua tahun terakhir. Hal tersebut dapat diukur dari jumlah dan persentase peningkatan aset serta peningkatan persentase pagu PNPB terhadap persentase total pagu dalam jangka waktu beberapa tahun tersebut.

Perkembangan Pengelolaan Aset satker BLUD di Propinsi xxx  
(dalam miliar rupiah)

No	Nama Satker BLUD	Aset 20XX	Aset 20XX+1
1.			
2.			
dst			

Sumber: Data Kanwil, Dit BLUD atau sumber lain yang relevan

Perkembangan Pagu PNPB dan Pagu RM satker BLUD di Propinsi xxx  
(dalam miliar rupiah)

No.	Nama Satker BLUD	20XX		20XX+1	
		Pagu RM	Pagu Rupiah	Pagu RM	Pagu Rupiah
1.					
2.					
dst					

Sumber: Data Kanwil, Dit BLUD atau sumber lain yang relevan

## 3. Analisis legal

Dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah terdapat beberapa peraturan yang mengatur bahkan sampai ke tingkat bupati/walikota. Peraturan-peraturan tersebut telah sinkron/masih bertentangan dengan peraturan induk pengelolaan BLU yaitu PP nomor 23/2005 jo PP nomor 74/2012 tentang Pengelolaan BLU dan Permendagri nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

Analisis Legal Aspek Pengelolaan BLU Daerah di Propinsi xxx

No.	Aspek	PP nomor 23/2005 jo PP nomor 74/2012	Permendagri nomor 61/2007	Peraturan Gubernur	Peraturan Bupati/Walikota
1.	Kelembagaan				
2.	Tata kelola				
3.	SDM				
4.	Pengendalian				

Sumber: Data Pemda, BLUD atau sumber lain yang relevan

## E. PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

### 1. Bentuk Investasi Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Bentuk investasi daerah tersebut dapat berupa investasi surat berharga dan/atau investasi langsung. Bentuk dan perkembangan investasi daerah di suatu provinsi, dapat disajikan pada tabel berikut ini:



### Bentuk Investasi Daerah di Propinsi xxx

No	Bentuk Investasi	TA 20XX	TA 20XX+1
1.	<b>Surat Berharga</b>		
	Pembelian Saham		
	Pembelian Surat Utang		
2.	<b>Investasi Langsung</b>		
	Penyertaan Modal Pemda		
	Pemberian Pinjaman		
	<b>Jumlah Investasi</b>		

## 2. Profil dan jenis Badan Usaha Milik Daerah

Sementara itu, untuk memberikan gambaran terkait perkembangan investasi di provinsi terkait, dapat terlihat dari profil dan jenis BUMD yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya dapat dijabarkan jumlah BUMD di Propinsi terkait dan pembagian/ pengelompokannya berdasarkan sektor atau bidang usahanya.

### Profil dan Jenis Usaha BUMD di Propinsi xxx

No	Nama Satker BUMD	Aset 20XX	Aset 20XX+1
1.			
2.			
3.			
dst			

Sumber: Data Pemda, BUMD atau sumber lain yang relevan

## F. SILPA DAN PEMBIAYAAN

### 1. Perkembangan surplus/defisit APBD

- a. **Rasio surplus/defisit terhadap agregat pendapatan**, rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplus/deficit anggaran terhadap pendapatan, yang menunjukkan performa fiskal pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan untuk mengcover belanja, atau penghematan belanja dengan kondisi pendapatan tertentu.

$$\text{Rasio surplus/ defisit thd pendapatan} = \frac{\text{Surplus atau defisit}}{\text{Total pendapatan APBD}}$$

- b. **Rasio surplus terhadap realisasi dana transfer (Semester I)**, rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplus/deficit anggaran terhadap salah satu sumber pendapatan APBD, yaitu realisasi pencairan dana transfer. Hal ini dapat menunjukkan eksese likuiditas Pemda pada semester I akibat *frontloading* pencairan dana transfer. Hal ini dapat menjadi sinyal bagi Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi timing pencairan dana transfer, terutama pada daerah yang sangat bergantung pada dana transfer namun mengalami eksese likuiditas.

$$\text{Rasio surplus/ defisit thd Dana Transfer} = \frac{\text{Surplus atau defisit Semester I}}{\text{Total realisasi dana transfer}}$$

- c. **Rasio surplus/defisit terhadap PDRB**, indikator ini menggambarkan kesehatan ekonomi regional, semakin kecil rasionya berarti daerah tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang cukup baik untuk membiaya hutang akibat defisit anggaran pemerintah daerah.

$$\text{Rasio surplus/ defisit thd PDRB} = \frac{\text{Surplus atau defisit APBD}}{\text{PDRB}}$$

- d. **Rasio SILPA terhadap alokasi belanja**, rasio ini mencerminkan proporsi belanja atau kegiatan yang tidak digunakan dengan efektif oleh pemerintah daerah

$$\text{Rasio SILPA} = \frac{\text{Jumlah SILPA}}{\text{Total belanja APBD}}$$

## 2. Pembiayaan daerah

- a. **Rasio pinjaman daerah atau obligasi daerah terhadap total pembiayaan**, rasio ini untuk mengetahui proporsi pencairan pinjaman yang dilakukan daerah ataupun penerbitan obligasi daerah untuk membiayai defisit APBD.

$$\text{Rasio Pinjaman Daerah} = \frac{\text{Realisasi pinjaman daerah atau obligasi daerah}}{\text{Total realisasi pembiayaan}}$$

- b. **Keseimbangan primer**, rasio ini mencerminkan indikasi likuiditas. Semakin besar surplus keseimbangan primer, maka semakin baik kemampuan untuk membiayai defisit.

$$\text{Keseimbangan primer} = \text{Total Pendapatan APBD} - \text{Total Belanja APBD} - \text{Belanja Bunga}$$

### Contoh Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Tujuan analisis pembiayaan adalah untuk mengetahui kontribusi besarnya utang daerah terhadap utang nasional, besarnya investasi yang dibiayai oleh utang tersebut. Contoh langkah-langkah dalam melakukan analisis pembiayaan:

1. Untuk melakukan analisis pembiayaan, perlu diberikan pemahaman akan konsep keseimbangan secara umum, yaitu meliputi:

- a. **Keseimbangan umum = Pendapatan – Belanja**

Salah satu tujuan analisis keseimbangan umum adalah untuk mengetahui apakah kebijakan fiskal yang dilakukan bersifat ekspansif atau kontraktif.

- 1) Jika  $P > B$  = Surplus, menunjukkan terdapat sumber pendapatan yang dapat digerakkan dari ekonomi dan APBN memiliki kapasitas untuk menghambat inflasi dan mengurangi defisit transaksi berjalan, kebijakan bersifat kontraktif.
- 2) Jika  $P < B$  = Defisit, APBN bersifat ekspansif untuk menggerakkan ekonomi, mengatasi kondisi resesi ekonomi, namun berpotensi terjadinya *default* jika tingkat defisit tidak terjaga.
- 3) Defisit yang terjaga = 3% PDRB (kaitan antara indikator fiskal dan indikator ekonomi regional).

- b. **Keseimbangan primer = Pendapatan - Belanja yang tidak terkait dengan pembayaran bunga cicilan hutang**

Tujuan analisis keseimbangan primer untuk mengukur apakah posisi fiskal pemerintah masih surplus jika pembayaran bunga tidak dihitung sebagai pengeluaran, untuk mengetahui apakah kondisi kesulitan fiskal tahun ini berasal dari akumulasi utang tahun-tahun yang lalu.

2. Analisis pembiayaan dilakukan juga dengan analisis skema pembiayaan
  - a. Skema pembiayaan antara lain: skema pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.
  - b. Analisis dampak defisit terhadap makroekonomi erat kaitannya dengan analisis skema pembiayaan, misalnya jika skema pembiayaan yang dilakukan lebih pada pembiayaan luar negeri, maka akan berpotensi mengurangi cadangan devisa, meningkatkan utang dst.
3. Defisit anggaran dianalisis lebih dalam lagi dengan menggali dampak defisit terhadap indikator makroekonomi lainnya. Jadi defisit bukan hanya dilihat dari pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, namun dari faktor-faktor penyebab lain yang disebabkan oleh perkembangan indikator makroekonomi.
4. Perlu dicari faktor yang paling besar/dominan yang mengakibatkan terjadinya defisit anggaran tersebut, kemudian menemukan alternatif solusi sebagai langkah antisipasi pada periode anggaran berikutnya.
5. Dalam menganalisis defisit, antara lain dapat dikaitkan dengan kondisi iklim investasi, apakah terdapat peningkatan iklim investasi pada periode tersebut dalam rangka optimalisasi pendapatan negara.
6. Apakah terdapat peningkatan kualitas belanja, apakah terdapat peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, apakah terdapat efisiensi belanja barang (operasional dan perjalanan dinas).
7. Apakah terdapat penundaan pembiayaan dari hutang-hutang (dianalisis kepatuhan di dalam pembayaran cicilan kredit program, misalnya antara lain tidak taatnya di dalam pelunasan kredit program).
8. Analisis Sumber-Sumber Pembiayaan
  - a. Penerimaan yang berasal dari pembiayaan harus dibayar kembali.
  - b. Transaksi pembiayaan adalah akumulasi atau pembayaran kembali utang pemerintah.
    - 1) Analisis pengendalian pembiayaan yang bersumber dari hutang dengan melihat proporsi hutang terhadap PDRB tidak lebih besar dari 60%.
    - 2) Walaupun terdapat sumber pembiayaan hutang, dapat ditelusuri apakah hutang dimaksud diarahkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif yang dapat meningkatkan nilai tambah atau nilai perekonomian.
    - 3) SAL, dikaji SAL yang umumnya besar yang ada di Pemda, berasal darimana saja SAL dimaksud misalnya, apakah berasal dari DAK yang ditransfer tetapi yang tidak digunakan di tahun yang bersangkutan (dilihat tren daripada perimbangan yang terkait DAK apakah sudah terakumulasi tidak digunakannya).
  - c. Setiap analisis indikator fiskal dikaitkan dengan konteks regional, sehingga perlu digali seperti konteks demografis, politik, administrasi, ekonomi, sosial dan kultur. Penggalan konteks sangat penting dalam menganalisis indikator fiskal

## **G. CONTOH ANALISIS LAINNYA**

Pada dasarnya, analisis yang dapat dipakai pada bab ini dapat mengambil referensi berbagai jenis analisis yang dipakai pada bab sebelumnya. Namun demikian, dapat dielaborasi lagi agar dapat lebih komprehensif, khususnya untuk mengkaji anggaran dan kebijakan fiskal yang diterapkan disuatu daerah, yaitu diantaranya:

### **1. Analisis Horizontal dan Vertikal**

Analisis horizontal dan vertikal digunakan untuk menginformasikan dan menilai kinerja pelaksanaan APBD di suatu wilayah.

a. Analisis Horizontal

Analisis horizontal merupakan analisis untuk membandingkan angka-angka dalam satu laporan realisasi Pemda (Kabupaten/Kota) satu dengan Pemda lain dalam satu wilayah (Provinsi). Selain itu, analisis ini merupakan analisis membandingkan perubahan keuangan dalam satu pos APBD yang sama pada satu lingkup Pemda. Tujuan dari analisis horizontal adalah untuk menyajikan informasi yang utuh terkait kinerja suatu pos antar Pemda dan perkembangan suatu pos APBD dari waktu ke waktu.

Contohnya:

- 1) realisasi PAD, antara Kabupaten/Kota A dengan Kabupaten B.
- 2) Realisasi belanja modal, dari tahun 2010 sampai dengan 2014 untuk lingkup Pemda tertentu.

b. Analisis Vertikal

Analisis vertikal merupakan analisis yang membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain terhadap totalnya dalam satu komponen APBD yang sama. Tujuan dari analisis vertikal adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pos dalam bentuk angka total, sehingga membantu pengguna dalam mengukur seberapa besar pengaruh pos tersebut bagi Pemda.

Contohnya:

- 1) berapa persen kontribusi PAD terhadap total pendapatan
- 2) berapa persen kontribusi Belanja Modal terhadap terhadap Total Belanja

2. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

Analisis kapasitas fiskal daerah adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan Keuangan Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang digunakan untuk membiayai tugas pemerintahan daerah setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin, sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

$$KF = \frac{(PAD + DBH + DAU + LP) - BP}{Jumlah\ penduduk\ miskin}$$

KF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

LP = Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

BP = Belanja Pegawai

## KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan mengenai alokasi dan perkembangan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah berikut analisisnya masing-masing. Bab ini adalah kajian terkait kekhususan daerah terkait keunggulan, potensi fiskal regional. Mengingat beragamnya karakteristik masing-masing daerah, baik dari segi demografis, kondisi dan potensi ekonomi, maupun *event-event* tertentu yang berdampak ekonomi (sebagaimana dalam bagian mengenai berita fiskal terpilih), maka dapat dilakukan suatu analisis baik yang sifatnya deskriptif, kualitatif, maupun menggunakan model ekonomi tertentu. Hal ini sangat penting untuk memperkaya kajian yang secara lebih spesifik pada topik-topik tertentu dan membahas keterkaitan kebijakan fiskal pemerintah dengan kondisi tertentu dimaksud.

Untuk melakukan analisis yang menyeluruh terhadap sektor atau bidang yang dianggap menjadi sektor/bidang unggulan disuatu daerah, dapat dilakukan analisis diantaranya:

### **Analisis Indikator Sektor Terpilih (difokuskan pada kekhususan daerah/wilayah)**

Analisis indikator sektor terpilih adalah analisis yang digunakan untuk memaparkan mengenai kinerja sektor terpilih. Dibawah ini beberapa contoh Analisis Indikator Sektor terpilih:

#### **a. Kesehatan**

Bagian ini menyajikan data fasilitas dan tenaga kesehatan pada suatu wilayah di suatu daerah. Data yang disajikan dapat berupa rasio Rumah Sakit, Puskesmas untuk setiap 100.000 penduduk, Selain itu perlu disajikan juga rasio tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat untuk setiap 100.000 penduduk, untuk lebih mempertajam analisis, maka dikaitkan juga analisis ini dengan belanja di sektor kesehatan selama 3-5 tahun terakhir.

#### **b. Pendidikan**

Bagian ini menyajikan data partisipasi pendidikan formal Angka Partisipasi Sekolah, persentase buta huruf dan rasio penduduk usia sekolah (PUS) dengan jumlah sekolah dan guru pada suatu wilayah, kemudian perbandingan antara murid dan guru/sekolah, angka partisipasi sekolah, angka melek huruf dst. Untuk mempertajam analisis, data tersebut dikaitkan dengan belanja di sektor pendidikan selama 3-5 tahun terakhir.

#### **c. Pertanian**

Bagian ini menyajikan data nilai tukar petani (selisih antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh petani), dan upah riil buruh tani. Hal ini untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani yang memiliki lahan dan buruh tani penggarap lahan. Selain itu dapat didetilkan menurut kondisi di daerah masing-masing, misalnya untuk daerah penghasil lobster dapat menambahkan grafik peningkatan hasil lobster.

#### **d. Transportasi**

Bagian ini menyajikan kondisi jumlah panjang jalan menurut kewenangan pada suatu wilayah, serta jumlah kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi infrastruktur serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menggunakan moda transportasi.

#### **e. Konstruksi**

Bagian ini memuat nilai konstruksi yang diselesaikan menurut jenis pekerjaan, serta jumlah perusahaan konstruksi pada suatu wilayah, untuk mengetahui perkembangan kemajuan pembangunan infrastruktur pada wilayah tersebut.

## Beberapa Contoh Sektor Unggulan Yang Dapat Disajikan Diantaranya:

### 1. Pertanian

Sebagai negara agraris tentunya tidak akan terlepas dari sektor pertanian. Kemajuan sektor pertanian akan berdampak positif terhadap penyediaan pangan bagi masyarakat di daerah tersebut. Kemajuan sektor pertanian tentunya akan ditandai dengan meningkatnya indeks nilai tukar petani. Propinsi xxx sebagai propinsi yang memiliki keunggulan di sektor pertanian selalu berusaha meningkatkan produksi pertaniannya. Adapun tren sektor pertanian Propinsi xxx selama semester I adalah sebagai berikut:

Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani di Propinsi xxx

Thn	Jan	.....	Des
XXXX-1			
XXXX			

Sumber: BPS/Dinas Pertanian atau sumber lain yang relevan

### 2. Pariwisata

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai keindahan alam yang sangat beragam yang dapat menjadi obyek pariwisata. Sektor pariwisata merupakan modal bagi suatu daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemberdayaan masyarakat sekitar. Indikator perkembangan sektor pariwisata dapat dilihat dari semakin meningkatnya tingkat kedatangan wisatawan mancanegara dan meningkatnya tingkat hunian hotel. Propinsi xxx sebagai propinsi yang memiliki keunggulan di sektor pariwisata selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan, infrastruktur agar kunjungan wisatawan selalu meningkat. Adapun tren sektor pariwisata Propinsi xxx selama semester I adalah sebagai berikut:

Perkembangan Tingkat Hunian Hotel di Propinsi xxx (dalam %)

Thn	Jan	.....	Des
XXXX-1			
XXXX			

Sumber: BPS/Dinas Pariwisata atau sumber lain yang relevan

Perbandingan Tingkat Kedatangan Wisatawan Mancanegara di Propinsi xxx  
(dalam ribuan)

Thn	Jan	.....	Des
Propinsi xxx			
Propinsi yyy			
Nasional			

Sumber: BPS/Dinas Pariwisata atau sumber lain yang relevan

### 3. Kelautan dan Perikanan

Selain sektor pariwisata, Indonesia juga dikaruniai laut yang luas dan beraneka ragam potensi kelautan, salah satunya komoditi perikanan. Potensi yang besar ini belum sepenuhnya digali secara maksimal. Padahal potensi kelautan dan perikanan mampu menjadi sumber PAD yang signifikan. Salah satu indikator perkembangan sektor kelautan dan perikanan adalah tingkat produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, perikanan laut. Propinsi xxx sebagai propinsi yang memiliki keunggulan di sektor kelautan dan

perikanan selalu berusaha meningkatkan produksi potensi kelautan dan perikanannya. Adapun tren sektor kelautan dan perikanan Propinsi xxx selama semester I adalah sebagai berikut:

Perkembangan Kelautan dan Perikanan di Propinsi xxx  
(dalam ton)

Jenis	Jan	....	Des
P.Tangkap			
P.Budidaya			
P.Laut			

Sumber: BPS/Dinas Kelautan dan Perikanan atau sumber lain yang relevan

Perbandingan Produksi Kelautan dan Perikanan di Propinsi xxx  
(dalam ton)

Propinsi	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Perikanan Laut
Propinsi xxx			
Nasional			

Sumber: BPS/Dinas Kelautan dan Perikanan atau sumber lain yang relevan

#### 4. Kehutanan

Tidak bisa dipungkiri, sektor kehutanan juga dapat menjadi sumber pundi-pundi PAD. Dengan otonomi daerah, pengelolaan sumberdaya hutan dapat dinikmati langsung oleh daerah. Dengan pengelolaan yang baik pada sektor kehutanan akan mampu meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Salah satu indikator perkembangan sektor kehutanan meningkatnya jumlah perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), luas areal Perusahaan HPH serta meningkatnya produksi Kayu Bulat oleh Perusahaan HPH. Propinsi xxx sebagai propinsi yang memiliki keunggulan di sektor kehutanan selalu berusaha meningkatkan produksi komoditi hutannya. Adapun tren sektor kehutanan Propinsi xxx selama semester I adalah sebagai berikut:

Perbandingan Perusahaan Pemegang HPH di Propinsi xxx

Propinsi	Jumlah Perusahaan Pemegang HPH		
	Tahun XXXX-2	Tahun XXXX-1	Tahun XXXX
Propinsi xxx			
Nasional			

Sumber: BPS/Dinas Kehutanan atau sumber lain yang relevan

Perbandingan Luas Areal Perusahaan Pemegang HPH di Propinsi xxx  
(dalam Ha)

Propinsi	Luas Areal Perusahaan Pemegang HPH		
	Tahun XXXX-2	Tahun XXXX-1	Tahun XXXX
Propinsi xxx			
Nasional			

Sumber: BPS/Dinas Kehutanan atau sumber lain yang relevan

## 5. Peternakan

Sektor peternakan merupakan komoditi yang telah lama dikembangkan oleh masyarakat Indonesia.. Meski demikian, sebagian besar masyarakat masih menggunakan metode tradisional. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan mengingat dengan meningkatnya sektor peternakan, akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan sektor peternakan ditandai dengan meningkatnya jumlah populasi ternak. Propinsi xxx sebagai propinsi yang memiliki keunggulan di sektor peternakan selalu berusaha meningkatkan produksi komoditi ternaknya. Adapun tren sektor Peternakan Propinsi xxx adalah sebagai berikut:

Populasi Ternak di Propinsi xxx

Jenis Ternak	Tahun XXXX-1	Tahun XXXX
Sapi Potong		
Sapi Perah		
dst		

Sumber: BPS/Dinas Peternakan atau sumber lain yang relevan

Jumlah Ternak yang dipotong di RPH (Rumah Potong Hewan) dan di luar RPH yang  
dilaporkan  
di Propinsi xxx

Jenis Ternak	Tahun XXXX-1	Tahun XXXX
Sapi Potong		
Kerbau		
dst		

Sumber: BPS/Dinas Peternakan atau sumber lain yang relevan

## 6. Pertambangan

Selain dikaruniai dengan alam yang indah, Indonesia juga dikaruniai kekayaan alam yang beraneka ragam. Kandungan mineral alam yang berlimpah membuat Indonesia kaya akan bahan tambang. Pemerintah Propinsi xxx dengan kondisi alamnya, memiliki potensi mineral tambang yang sangat melimpah. Peningkatan sektor pertambangan dapat dilihat dari meningkatnya produksi Minyak Bumi, Gas Alam dan Barang Tambang Mineral. Adapun tren sektor Pertambangan Propinsi xxx adalah sebagai berikut:

Jumlah Produksi Minyak Bumi, Gas Alam, Mineral  
di Propinsi xxx

Jenis Minyak, Gas, Mineral	Tahun XXXX-1	Tahun XXXX
Minyak Bumi (barell)		
Gas Alam (MMscf)		
dst		

Sumber: BPS/Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral atau sumber lain yang relevan

Tren Produksi Minyak Bumi, Gas Alam, Mineral  
di Propinsi xxx

Jenis Minyak, Gas, Mineral	Jan	...	Des
Minyak Bumi (barell)			
Gas Alam (MMscf)			
Batu Bara (ton)			
dst			



## BAB VI

### ANALISIS TANTANGAN FISKAL DAERAH/REGIONAL

Memperhatikan hasil analisis sebagaimana yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya, dapat diidentifikasi lebih lanjut tantangan fiskal regional spesifik yang dihadapi oleh daerah. Analisis tantangan fiskal regional memberikan informasi bagi para *stakeholders* untuk mengatasi tantangan dimaksud dan meningkatkan efektifitas kebijakan fiskal regional.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pada bagian ini, perlu disampaikan kesimpulan atas berbagai materi dan pokok bahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

#### **B. REKOMENDASI**

Memuat rekomendasi yang bersifat indikatif dari hasil analisis fiskal regional yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, O; Johnson, D, *Macroeconomics*, Pearson
- Blöndal, J. R. 2001, 'Budgeting in Sweden', *OECD Journal on Budgeting*, vol. 1, no. 1, pp. 27-57.
- Dong Fu, Lori L Taylor, Mine K. Yucel (2003). *Fiscal Policy and Growth*. Research Departement Working Paper 0301.
- Irawan, M.Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan Edisi ke 6*. BFE-Yogyakarta: Yogyakarta
- N. Gregory Mankiw (2009). "Macroeconomics" Seventh Edition. Harvard University.
- Olivier Blanchard, David R. Johnson (2013). "Macroeconomics" Sixth Edition. Pearson Education Inc. 2013.
- Robert J. Barro and Xavier Sala-i-martin (2004). "Economic Growth" Second Edition. The MIT Press Cambridge, Massachusett.
- Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard (2011). "Macroeconomics" Eleventh Edition. McGraw-Hill International Editions
- Schick, A. 1996, 'The Spirit of Reform: managing the New Zealand state sector in a time of change', *Report prepared for the State Services Commission and the Treasury, Wellington, New Zealand*.
- Schick, A. 1998, 'Why most developing countries should not try New Zealand's reforms', *The World Bank Research Observer*, vol. 13, no. 1, pp. 123-131.
- Todaro, M.P, 1977, *Economics for a developing world : an introduction to principles, problems and policies for development*, Longman, London
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.07/ 2014 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2011 Tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum

---

DIREKTUR JENDERAL,



MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP. 19590606 198312 1 001